

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI  
KAMPUNG KUBANG SAMAE DESA TANON KECAMATAN  
MAYOR THAILAND SELATAN**

Oleh :

**Mr. Fursan Jehdeng  
187322057**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif  
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

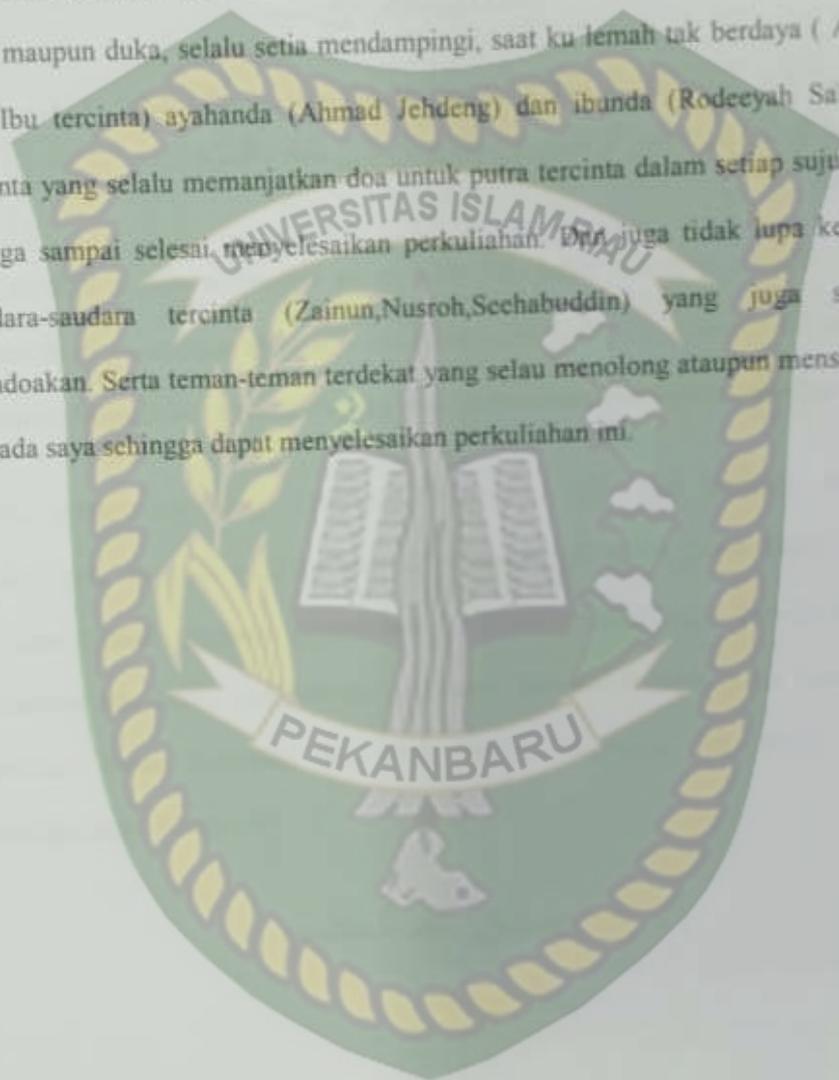


**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat ku lemah tak berdaya ( Ayah dan Ibu tercinta) ayahanda (Ahmad Jehdeng) dan ibunda (Rodeeyah Salah) tercinta yang selalu memanjatkan doa untuk putra tercinta dalam setiap sujudnya hingga sampai selesai menyelesaikan perkuliahan. Dan juga tidak lupa kepada saudara-saudara tercinta (Zainun, Nusroh, Sechabuddin) yang juga selalu mendoakan. Serta teman-teman terdekat yang selalu menolong ataupun mensupport kepada saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## LEMBAR TUNJUK AJAR



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yaaa aiyuhal laziina amanuuu atii'ul laaha wa atii'ur Rasuula wa ulil amri  
minkum fa in tanaaza'tum fii shai'in farudduuhu ilal laahi war Rasuuli in kuntum  
tu'minuuna billaahi wal yawmil Aakhir; zaalika khairunw wa ahsanu taawiilaa

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul  
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian,  
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah  
(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari  
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik  
akibatnya.(surat Annisa-59)

صدق الله العظيم

## RIWAYAT HIDUP



Mr. Fursan jehdeng dilahirkan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor provinsi Pattani selatan Thailand tanggal 19 Oktober 1992. Anak pertama dari empat bersaudara pasangan dari H. Ahmad jehdeng dan Hj. Rodeyah salaeh. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar (SD) seklah dasar desa Tanon (โรงเรียนบ้านถนน) selesai tamat sekolah dasar lanjut pula ke sekolah menengah pertama (SMP) di sekolah Isalam sast wittaya school (โรงเรียนอิสลามศาสตร์วิทยา ตำบล สะก้า อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี) selesai tamat sekolah SMP lanjut pula ke seklah menengah atas (SMA) di sekolah Samakki sast wittaya school (โรงเรียนนสามัคคีศาสตร์วิทยา ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา) .

pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Riau (UIR) tepatnya di fakultas agama Islam program studi pendidikan agama Islam (PAI) pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan strakta dua (S2) di universitas Islam Riau juga tepatnya di pascasarjna program studi ilmu pemerintahan.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAMPUNG  
KUBANG SAME DESA TANON KECAMATAN MAYOR SELATAN  
THAILAND**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**Mr. FURSAN JEHDENG**

Desa Tanon merupakan desa yang berada di wilayah kecamatan Mayor selatan Thailand. Dapat dikatakan bahwa desa tersebut terbelang masih dalam taraf pembangunan. Kebijakan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat maka pihak pemerintah desa mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Indikator penilaian yang digunakan implementasi kebijakan G.C Edward III adalah komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berlokasi di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand. Penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif, yaitu menyebarkan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian menjadi bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu key informan masyarakat di kampung Kubang samae dengan jumlahnya 50 orang. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian dalam menetapkan individu sampel adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan teknik menyebarkan kuisisioner dan data sekunder dikumpulkan dengan cara dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon. Karena peranan pemerintah desa sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: koefisien determinasi yang dipengaruhi oleh variabel X terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pada kampung Kubang samae desa Tanon adalah kurang maksimal. Sedangkan koefisiensi korelasi yang dipengaruhi oleh variabel X terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon adalah sangat erat. Dari hasil penelitian di atas peneliti mencoba sarankan kepada pemerintah desa Tanon bahwa semakin baik kebijakan maka akan menciptakan peningkatan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi.

**Kata kunci : Pelaksanaan kebijakan, partisipasi masyarakat.**

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT POLICIES OF  
INCREASING COMMUNITY PARTICIPATION IN KUBANG SAMAE SUB-  
VILLAGE TANON VILLAGE MAYOR DISTRICT SOUTH THAILAND**

**ABSTRACT**

**By**

**Mr. FURSAN JEHDENG**

*Tanon Village is a village located in the southern Mayor district of Thailand. It can be said that the village is still in the development stage. Village government policies in order to increase community participation, the village government issues policies. This study aims to determine the implementation of village government policies to increase community participation. The assessment indicators used for the implementation of the G.C Edward III policy are communication, resources, attitudes and bureaucratic structures towards increasing public participation. This research is located in Kubang samae village, Tanon village, Mayor sub-district south of Thailand. The author uses this type of quantitative research and uses descriptive methods, namely distributing a questionnaire list as a means of collecting data and data collected by this tool then becomes the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the research location. The population group and sample in this study were the key informants of the community in village with a total of 50 people. The sampling technique used in the study in determining individual samples was purposive sampling. The data collection technique consists of primary data collected by distributing questionnaires and secondary data collected by means of documentation. This study aims to describe the implementation of village government policies to increase community participation in village Because the role of the village government is very important in improving the welfare of the village community. The results of this study indicate that: The coefficient of determination which is influenced by variable X on the increase in community participation in village, Tanon village is less than optimal. Meanwhile, the correlation coefficient that affects variable X on the increase in community participation in village, Tanon village is very close. From the results of the research above, the researcher tries to suggest to the Tanon village government that the better the policy, the higher the increase in community participation*

**Keywords: Policy implementation, community participation.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang diberikan Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini dengan judul: “ **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAMPUNG KUBANG SAMAE DESA TANON KECAMATAN MAYOR THAILAND SELATAN**“ tanpa halangan suatu apapun.

Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Proposal Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga Proposal Tesis ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C. L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Program Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, semoga ditangan bapak banyak terdidik kader-kader ilmu pemerintahan yang berguna bagi Bangsa dan Agama.

3. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulisan penelitian ini.
4. Bapak Dr.Rahyunir Rauf,M.Si. Selaku Pembimbing II dan Wakil Direktur I Bidang Akademik.
5. Terima kasih kepada Seluruh Dosen dan staf karyawan TU Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, baik yang pernah menjadi pengajar dan pendidik serta seluruh Dosen yang ada di Pasca Sarjana yang telah mendidik dan mengajarkan saya.
6. Ahmad jehdeng (Ayah) Rodeeyah salaeh (Ibu) Keluarga saya tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa.
7. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru,10 Maret 2021

Penulis

**Mr.Fursan jehdeng**

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSEBAHAN.....	v
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	vi
ABSTAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Uraian Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1. Manfaat Akademik.....	12
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
1.4.3. Manfaat Teoritis.....	12

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1.Kajian Pustaka.....	14
2.1.1 Konsep Pemerintahan.....	14
2.1.2 Konsep Pemerintahan Monarkhi.....	17
2.1.3 Konsep Implementasi Kebijakan.....	21

2.1.4	Konsep Kebijakan.....	25
2.1.5	Konsep Organisasi.....	30
2.1.6	Konsep Manajemen.....	31
2.1.7	Konsep Desa.....	31
2.1.8	Konsep Pemerintah Desa.....	33
2.1.9	Konsep Partisipasi Masyarakat.....	35
2.1.10	Konsep Pelaksanaan Tugas.....	40
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	41
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	42
2.3.1	Konsep operasional.....	44
2.3.2	Konsep operasional variable.....	45
2.4.	Teknik pengukuran.....	49

**BAB III : OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1.	Tipe penelitian.....	51
3.2.	Lokasi .Penelitian.....	51
3.3.	Populasi dan Sampel.....	52
3.4.	Teknik penarikan sampel/responden.....	53
3.5.	Jenis dan sumber data.....	54
3.6.	Teknik pengumpulan data.....	54
3.7.	Teknik analisa dan keabsahan data.....	56
3.8.	Jadwal Penelitian .....	58
3.9.	Rencana Sistematika Laporan Usulan Penelitian .....	59

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

4.1 Identitas responden.....	61
4.2 Gambran umum lokasi penelitian.....	65
4.3 Hasil penelitian.....	71
4.3.1 Analisis implementasi kebijakan pemerintah desa.....	71
4.3.2 Analisis peningkatan partisipasi masyarakat.....	105
4.3.3 Analisis implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand.....	107

## **BAB V : KESIMPULAN DAN DARAN**

5.1 Keesimpulan.....	122
5.2 Saran-Saran.....	123

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1:</b> Penelitian terdahulu .....	<b>42</b>
<b>Tabel 2.2 :</b> Konsep Operasional Variabel Implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand selatan.....	<b>47</b>
<b>Tabel 3.1 :</b> Daftar Informasi dan Key Informasi Mengenai Implementasi kebijakan pemerintahan desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di kampung kubang samae Desa Tanon kecamatan Mayor Thailand Selatan.....	<b>53</b>
<b>Tabel 3.2 :</b> Jadwal dan waktu penelitian tentang Implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae Desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan.....	<b>58</b>
<b>Tabel 4.1 :</b> Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	<b>61</b>
<b>Tabel 4.2 :</b> Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis usia.....	<b>62</b>
<b>Tabel 4.3 :</b> Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	<b>63</b>
<b>Tabel 4.4 :</b> Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	<b>64</b>
<b>Tabel 4.5 :</b> Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	<b>67</b>
<b>Tabel 4.6 :</b> Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	<b>68</b>
<b>Tabel 4.7:</b> Tanggapan Responden Mengenai pemerintah desa menyebar informasi tentang perencana desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>72</b>
<b>Tabel 4.8 :</b> Tanggapan Responden Mengenai mengenai Kesesuaian isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat oleh pemerintahan desa kepada masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>73</b>

<b>Tabel 4.9</b>	: Tanggapan Responden Mengenai mengenai pemerintahan desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>75</b>
<b>Tabel 4.10</b>	: Tanggapan Responden Mengenai mengenai pemerintahan desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>76</b>
<b>Tabel 4.11</b>	: Tanggapan Responden Mengenai mengenai pemerintahan desa membuat Pengaturan desa dengan membuat peraturan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand..	<b>78</b>
<b>Tabel 4.12</b>	: Rekapitulasi Dimensi dan Indikator Komunikasi.....	<b>80</b>
<b>Tabel 4.13</b>	: Tanggapan Responden Mengenai mengenai pemerintahan desa Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand..	<b>82</b>
<b>Tabel 4.14</b>	: Tanggapan Responden Mengenai Pemerintahan desa Menyediakan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand...	<b>83</b>
<b>Tabel 4.15</b>	: Tanggapan Responden Mengenai Kecukupan sarana dan prasarana pembangunann di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>85</b>
<b>Tabel 4.16</b>	:Tanggapan Responden Mengenai Upaya pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>86</b>
<b>Tabel 4.17</b>	: Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Berkompetensi untuk melaksanakan pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>87</b>
<b>Tabel 4.18</b>	: Rekapitulasi Dimensi dan Indikator sumber daya.....	<b>88</b>
<b>Tabel4.19</b>	: Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Menyelenggarakan pemerintahan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>90</b>
<b>Tabel 4.20</b>	: Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>91</b>

<b>Tabel 4.21</b> : Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Membina kehidupan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>92</b>
<b>Tabel 4.22</b> : Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Mengawas dalam setiap kegiatan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>93</b>
<b>Tabel 4.23</b> : Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa ada Keinginan melaksanakan program pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>94</b>
<b>Tabel 4.24</b> : Rekapitulasi Dimensi dan Indikator sikap.....	<b>95</b>
<b>Tabel 4.25</b> : Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Membagi tugas dan wewenang program pembangunan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>97</b>
<b>Tabel 4.26</b> : Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>98</b>
<b>Tabel 4.27</b> : Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>99</b>
<b>Tabel 4.28</b> : Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>100</b>
<b>Tabel 4.29</b> : Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Adanya standard dan prosedur dalam pelaksanaan m di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.....	<b>102</b>
<b>Tabel 4.30</b> : Rekapitulasi Dimensi dan Indikator Struktur Birokrasi.....	<b>103</b>
<b>Tabel 4.31</b> : Rekapitulasi Dimensi dan Indikator variable Implementasi Kebijakan pemerintahan desa.....	<b>104</b>
<b>Tabel 4.32</b> : Tanggapan responden mengenai dari pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa anda merasa ada peningkatan partisipasi masyarakat di kampung anda.....	<b>106</b>
<b>Tabel 4.33</b> : Hasil Uji Validitas Instrument Penelitian.....	<b>108</b>

<b>Tabel 4.34</b> : Hasil Uji Reliabilitas Instrument Penelitian.....	<b>109</b>
<b>Tabel 4.35</b> : Hasil Uji Multikolinieritas.....	<b>114</b>
<b>Tabel 4.36</b> : Coefficients <sup>a</sup> .....	<b>115</b>
<b>Tabel 4.37</b> : Model Summary.....	<b>120</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> : Model Implementasi Edward III .....	23
<b>Gambar 2.2</b> : Lingkungan Kebijakan .....	30
<b>Gambar 2.3</b> : Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.....	44
<b>Gambar 4.1</b> : struktur pemerintahan desa di desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan.....	70
<b>Gambar 4.2</b> : Descriptive Statistics.....	110
<b>Gambar 4.3</b> : Grafik Histogram.....	111
<b>Gambar 4.4</b> : Hasil Uji Normalitas.....	112
<b>Gambar 4.5</b> : Hasil Uji Heterokedastisitas.....	113
<b>Gambar 4.6</b> : ANOVA <sup>a</sup> .....	117

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Implementasi Kebijakan pemerintahan desa (การดำเนินงานตามระบบการปกครองของหมู่บ้าน) untuk meningkatkan efektivitas kinerja dalam satu birokrasi pemerintahan perlu adanya konektivitas antara atasan dan bawahan, hubungan ini terjalin apabila komunikasi berjalan dengan baik. Komunikasi merupakan item penting dalam meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih baik di pusat dan daerah sampai pada unsur pemerintahan terendah yaitu ditingkat desa, tatakelola pemerintahan yang baik harus menjadi prioritas utama karena merupakan proses dalam mencapai pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam mewujudkan kualitas pelayanan pemerintah yang baik, melalui tata kelola pemerintah serta sistem kerja pemerintah yang benar.

Sebagai salah satu entitas penting pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa merupakan ujung tombok pembangunan karena kedekatannya dengan masyarakat serta ruang lingkup administrasinya yang

sempit. Bertolak dari fakta ini, maka desa sebagai bagian integral dari pemerintah disatu sisi dan juga pada sisi lain, memiliki peran sebagai pelindung enitas local, maka sudah sepatutnya desa dikelola sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum serta mengedepankan asas manfaat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat pemerintah melalui peraturan perlu mengatur masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan di tingkat desa yang disebut lembaga kemasyarakatan desa. Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdiri atas lembaga formal. Didirikan atau diponsori oleh pemerintah dan dibayai oleh pemerintah.

Thailand telah memerintah secara demokratis (ประชาธิปไตย). Monarki(สถาบันพระมหากษัตริย์) yaitu kepala, dan di bawah konstitusi atau hukum di negara ini. Konstitusi(รัฐธรรมนูญ) Kerajaan Thailand Tahun 1991 menetapkan bahwa "Raja diadakan di posisi dihormati. Siapa Tidak akan dilanggar dan dituduh maupun setiap penuntutan" Dalam demokrasi, Raja Maha netralitas politik. Hal ini tidak didukung oleh partai politik pada khususnya. Negara dengan insiden serius terjadi. Dia akan tetap sebagai kepala administrasi publik saat ini. Kewenangan pemerintah, dengan kepemimpinan perdana menteri di kementerian Kabinet. Administrasi Peraturan secara administratif dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- 1 Wilayah tengah Sentralisasi kementerian pemerintah, termasuk Perdana Menteri, dengan Menteri Kementerian Administrasi Publik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai daerah yang ditetapkan. Hal ini akan

memungkinkan penyelesaian misi. Administrasi dibagi menjadi departemen. Departemen dibagi menjadi Divisi Para pejabat pemerintah bertanggung jawab masing-masing.

2. Pembagian kekuasaan dari pusat ke persatuan dan stabilitas negara. Administrasi dibagi menjadi provinsi, Gubernur adalah seorang eksekutif dengan Dewan County. Setiap provinsi dibagi menjadi kabupaten, pemerintah. Para pejabat sedang menunggu pemerintahan.
3. Pemerintah lokal Termasuk desentralisasi Organisasi Administratif provinsi dan Kecamatan, Kota dan otonomi daerah, termasuk Bangkok dan Pattaya. Pemerintahan Bangkok dan administrasi publik, menurut Undang-Undang Bangkok Metropolitan Administration Tahun 1975 dengan pendapatan properti dan staf mereka sendiri Gubernur Bangkok memiliki.

Provinsi Sebagai badan hukum, membangun, runtuh dan merubah provinsi.

Stempel kerajaan Perintah gubernur kepala pengawas Pejabat dari berbagai departemen dalam dan di luar Kementerian Dalam Negeri. Lembaga pemerintah di bawah Departemen dalam Negeri dan Dinas Provinsi. Dan Kantor Pemerintah Provinsi.

Pemerintah kabupaten adalah wakil dari provinsi ke kabupaten dihapuskan dan diganti dengan sebuah dekrit kerajaan. Sebuah sheriff adalah kepala pengawil Resmi junior di pemerintahan kabupaten dan kabupaten adalah Kantor Administrasi Kabupaten dan Kantor kecamatan.

Distrik Bagian dari kabupaten membangun secara hukum, pemerintah daerah pada tahun 1914 ada juru sita sebagai kepala District, menjadi kepala mengadakan Organisasi penting adalah Administrasi Kantor Kecamatan.

Kabupaten dan desa Unit ini merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten. Atau Kabupaten Hukum fitur administrasi daerah pada tahun 1914 daerah didirikan dari pengumuman Kementerian dalam Negeri mengadakan kepala desa sebagai bertanggung jawab terhadap kabupaten bagian desa ini didirikan dari mengumumkan oleh provinsi mengadakan seorang kepala kampung yang bertanggung jawab terhadap kampung.

Pelaksanaan system pemerintah desa merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program kepala Desa diseluruh Kampung Kubang samae Negara Thailand. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program meningkatkan partisipasi masyarakat bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat.

#### **Tugas dan Fungsi Kerja Desa:**

Tugas dan kekuatan kepala desa Muncul di bawah Undang-Undang Administrasi Lokal 1914. Pasal 34 (Amandemen hingga saat ini). Semua inspeksi untuk menjaga kelancaran di paroki yaitu untuk memberi tahu orang-orang di distrik itu untuk mematuhi keputusan hukum. Atau pencegahan bahaya dan kebahagiaan orang-orang di distrik itu Atau untuk menerima pekerjaan yang bahagia Penderitaan orang-orang di distrik itu mengangkat siswa ke gubernur departemen distrik dan menerima pengumuman pemerintah kepada orang-orang

di distrik itu. Atau untuk mengelola sesuai dengan Keputusan Darurat tentang Hukum Shane, pemeriksaan dan pengumpulan pajak di kabupaten itu Ini akan menjadi tugas Camat Semua kepala desa di distrik itu dan dokter paroki harus membantu Dapat meluangkan waktu untuk mengelolanya dengan benar sesuai kebutuhan

Pasal 34 bisa Selain kekuasaan dan tugas yang disebutkan secara khusus di sini, adalah wewenang kepala desa untuk memiliki wewenang yang sama dengan kepala desa.

(Ketentuan Pasal 34 bisa ditambahkan oleh pasal 12 dari Undang-Undang Administrasi Daerah (No. 2) tahun 1943)

**A. Posisi ketua:** pasal 35 Administrasi Lokal 1914. Pasal 34 (Amandemen hingga saat ini). Kepala desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Ketika mengetahui berita bahwa suatu tindakan ilegal telah terjadi atau mencurigai telah terjadi, distriknya harus memberi tahu Departemen Distrik.
2. Ketika mengetahui berita bahwa telah terjadi pelanggaran atau dugaan bahwa telah terjadi di distrik terdekat, harus memberi informasi kepada camat.
3. Ketika tampaknya ada orang yang bertindak melanggar hukum, atau ada alasan untuk mencurigai bahwa orang yang melakukan pelanggaran itu baik, maka ia harus mengirimnya ke Departemen Distrik.
4. Jika ada tanda atau perintah sesuai dengan tugas resmi, mengatur siapa pun di distrik itu adalah tugas camat untuk menangkapnya.

5. Ketika pejabat memiliki tugas untuk mengeluarkan perintah untuk mencari atau merebut Kamnan harus dikelola sesuai dengan aturan.
6. Jika seseorang datang untuk membekukan orang atau benda, atau perampokan melakukan hukum, atau ada seseorang yang meminta untuk melakukan pemeriksaan post-mortem, baik bagi inspektur desa untuk mendengarkan pesan. Bekukan dan bawa semua barang yang akan dibawa ke Departemen Distrik. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka inspektur desa dapat membawanya ke departemen distrik pada saat itu.

**B. Direktur (Kelapala kelompok kerja)** yaitu operasi direktur itu Adalah mengintegrasikan berbagai alat yang digunakan di sekitar mereka untuk mendapat manfaat Apakah itu mencari informasi, informasi yang relevan untuk mengumpulkan informasi sesuai dengan Fakta yang terjadi sesuai dengan situasi, mengevaluasi data yang diterima dari pertimbangan situasi. Evaluasi data Dan kemungkinan tren Tentukan konsep dan cara untuk tampil sebaik mungkin dan sesuai untuk memaksimalkan manfaat. Dan buat proyek dengan urutan langkah Untuk menjadi proposal dalam praktik yang tepat Untuk pertimbangan atasan Ada analisis misi yang ditugaskan Oleh direktur departemen untuk memberikan ide untuk perencanaan Dan harus memiliki perkiraan direktur Untuk memperkirakan kebutuhan atasan Memberi kesepakatan Dan konsep praktiknya Persiapan rencana dan perintah persetujuan ketika penyelia memutuskan Kemudian lanjutkan dalam proses koordinasi, mengawasi dan menindaklanjuti pada tingkat atas dan bawah.

**C. Administrasi Dan keamanan (Kelapala kelompok kerja)** Bertanggung jawab untuk mendorong orang untuk berpartisipasi Demokrasi Dengan Raja sebagai kepala negara, mempromosikan ideologi demokrasi dan cara hidup bagi penduduk desa di desa, mempromosikan dan memastikan bahwa orang mematuhi hukum dan peraturan desa Menciptakan keadilan dan kompromi perselisihan Surveilans, kedamaian dan ketertiban, pencegahan dan penindasan obat-obatan di desa, perlindungan properti publik di desa

**D. Rencana pengembangan desa (Kepala kelompok kerja)** tugas dan fungsi antara lain:

- 1 Mengembangkan desa berdasarkan cara hidup Lingkungan dan modal sosial yang ada.
- 2 Membentuk 8 komite tokoh masyarakat.
- 3 Buat rencana dan rencana untuk pembangunan desa bersama.
- 4 Penekanan pada orang-orang di desa untuk berpartisipasi dalam setiap langkah.
- 5 Pertemuan tersebut menyajikan laporan kemajuan bulanan.
- 6 Patuhi prinsip-prinsip pekerjaan dan pekerjaan.
- 7 Bertujuan untuk menguntungkan semua pihak Terutama manfaat masyarakat.
- 8 Mengobati orang yang bermasalah dan bahagia.
- 9 akan bersama-sama menyelesaikan masalah sosial.
- 10 Proyek pemuda untuk mengukur perkembangan mental setiap hari.
- 11 Promosikan kegiatan olahraga.
- 12 Desa bebas narkoba.
- 13 Mulut lambung penting dalam kehidupan.
- 14 Cara mengatasi penderitaan yang disebabkan oleh keinginan.
- 15 Bawa konsep ekonomi kecukupan.
- 16 Menanam sayuran.
- 17 Mempromosikan karier.
- 18 Mendukung penggunaan sumber daya masyarakat.
- 19 Kembangkan lingkungan.
- 20 Pengomposan.
- 21 Menanam pohon.
- 22 Kembangkan pengolahan air.
- 23 Kembangkan tempat wisata.
- 24 Memecahkan masalah dengan mulut perut.
- 25 Negara yang layak huni Memuliakan moralitas.

- 26 Kelompok Tani Muda Luar Biasa.
- 27 Desa yang layak huni.
- 28 Desa Ekonomi Kecukupan Bahagia.
- 29 Klub Lansia.
- 30 Pemuda desa.
- 31 "Seperti halnya kolam, air menyerap air, jadi kemandirian termasuk keringat dan ketekunan."
- 32 Komunitas yang kuat.

**E. Promosi ekonomi (Kepala kerja)** tugas dan fungsi yaitu Yayasan Pusat Layanan Promosi Ekonomi adalah pusat layanan akademik dan pengembangan kapasitas pengembangan ekonomi masyarakat. Yang merupakan saluran untuk menghubungkan penggunaan sumber daya dari sumber dana, sumber produksi, sumber pasar, sumber pengetahuan di sektor publik dan swasta dan sebagai mekanisme pendorong untuk meningkatkan efisiensi Pengelolaan sumber pendanaan, kelompok pekerjaan, kelompok produsen / satu operator Tambon Satu produk Untuk menciptakan pengembangan karier Dan buat penghasilan seperti komunitas Untuk mempengaruhi orang-orang di desa Untuk memiliki landasan ekonomi yang stabil dengan dukungan dan promosi pengembangan masyarakat Antara mitra pembangunan di tingkat kabupaten.

Layanan pusat berarti menyediakan layanan sesuai dengan misi satu atau lebih pusat. Atau setiap misi kepada orang / kelompok sasaran yang meminta layanan pusat sesuai dengan kebutuhan penerima layanan, baik dalam hal menerima layanan di lokasi pusat dan proaktif, yaitu layanan seluler Sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan situasi yang mendesak Dengan mengelola dan menyediakan layanan dalam bentuk komite yang terdiri dari perwakilan jaringan OTOP, tokoh masyarakat, pakar, penduduk desa,

pakar Pakar Pejabat Pengembangan Masyarakat dan Para Pihak, Instansi Pemerintah

**F. Lingkungan sosial (Kepala kerja)** Continental berfokus pada tanggung jawab sosial dengan memberikan bantuan di daerah terpencil, masyarakat atau daerah setempat. Termasuk proyek yang didirikan dan dioperasikan oleh karyawan Dan menerima beberapa dukungan dari organisasi Selain itu, organisasi juga memberikan bantuan untuk proyek-proyek komunitas. Dan berbagai kegiatan amal Di daerah setempat Misi kami adalah untuk fokus pada tiga bidang: pengembangan sosial dan keselamatan jalan. Memberikan pengetahuan untuk pemecahan masalah dan olahraga. Dalam situasi darurat atau darurat Continental siap menjadi bagian dalam membantu berbagai proyek. Termasuk bencana alam di seluruh dunia

**G. Pendidikan agama dan budaya (Kepala kerja)** Administrasi Akademik Teknologi Pendidikan Manajemen Pendidikan Pekerjaan pengujian dan evaluasi, mengukur hasil Layanan dan pemeliharaan sekolah Pusat Pengembangan Anak Urusan Anak dan Remaja Olahraga dan Rekreasi Lanjutkan dengan manajemen pendidikan Promosi dukungan pendidikan Agama dan budaya Dan tradisi yang baik dari rakyat Personil pendukung, material, peralatan, dan aset Untuk manfaat pendidikan Atur tempat untuk pendidikan Promosikan dan pertahankan Di mana seni, tradisi, adat dan tradisi lokal Budaya bahasa Gaya hidup, mendukung olahraga Promosi dan pengembangan tempat wisata dan Melakukan tugas dan tugas terkait lainnya Bagilah pemerintah internal menjadi 3 tugas:

1. Administrasi Pendidikan Memiliki tanggung jawab
  - a. Manajemen personalia
  - b. Manajemen umum
  - c. Administrasi Pendidikan
  - d. Perencanaan dan statistik
  - e. Keuangan dan akuntansi
2. Promosi pendidikan Agama dan budaya Memiliki tanggung jawab
  - a. Urusan agama
  - b. Promosi tradisi Seni dan budaya
  - c. Urusan Anak dan Remaja
  - d. Olahraga dan rekreasi
3. Urusan Sekolah Memiliki tanggung jawab
  - a. Manajemen Pendidikan
  - b. Pekerjaan pendidikan jasmani
  - c. Pengujian, evaluasi dan evaluasi sekolah
  - d. Layanan dan pemeliharaan sekolah
  - e. Pusat Pengembangan Anak

**H. Aspek lainnya (Kepala kerja) adalah berikut:**

- Semua dokumen kepala desa dan masyarakat di kampung Kubang samae Thailand Selatan.
- Biaya kepala desa dan masyarakat di kampung Kubang samae Thailand Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di kemukakan fenomena sebagai berikut :

1. Terindikasi tingkat peranan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat di Kampung Kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang Samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan”**

## **1.2 Uraian Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis melihat bahwa **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan?.”** belum terlaksana sesuai dengan tugas fungsi pokoknya sehingga hal ini menjadi permasalahan dimasyarakat, untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:  
Bagaimana pelaksanaan struktur,tugas pokok pemerintahan di kampung kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dicirikan sebagai berikut:

Untuk mengetahui Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.

Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mningkatkan partisipasi masyarakat di Kampung Kubang samae samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dapat diketahui gambaran Implementasi kebijakan pemerintah desa yang ada, maka manfaat yang diharapkan penelitian sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akdemis

Penelitian ini diharapkan bisa memperdalam kajian teori tentang Implementasi kebijakan pemerintah desa serta kepada semua pihak kerja yang kepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas administrasi desa.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna kepada penganbil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan. Manfaat Teoritis

Tesis ini diharapkan dapat menjadi referensi/rujukan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 1.1 Tinjauan Pustaka

##### 1.1.1 Konsep Pemerintahan

###### Pengertian Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok maupun individu dengan kelompok. Gerakan ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.<sup>1</sup> Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengetahuan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.<sup>2</sup>

Max webber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menompang kalim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan fisi untuk memaksakan aturan-aturannya dalam suatau wilayah tertentu. Atas eksekutufisme tersebut sebuah memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki

---

<sup>1</sup> Talizuduhu Ndaraha, 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta,

<sup>2</sup> Syafii, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Jawa Barat

angkatan perang mempertahankan negaranya dari serangan dan invansi Negara lain, pemerintah harus memiliki suatu lembaga yang bertanggung jawab secara legislative dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.<sup>3</sup>

Bahasa kata “pemerintahan” terdiri dari kosa kata pe.me.rin.tah.an atau “pemerintah”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti :

1. proses, cara, perbuatan memerintah: ~ yang berdasarkan demokrasi
2. segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara Sumber “Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”.

Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/ pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat

---

<sup>3</sup> Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara<sup>4</sup>

Negara modern abad XX sebagai administrasi Negara tradisional atau lama dan dibandingkan dengan teori baru yang mereka sebut governance tersebut. Governance diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya keputusan tersebut. Good governance bisa dicapai apabila terdapat hubungan yang sinergis diantara Negara, sector swasta dan masyarakat.

Hubungan tersebut dicirikan oleh adanya:

1. partisipasi: bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan.
2. Atau hukum (rule of law); kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia,
3. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor,

---

<sup>4</sup> Surianingrat Bayu 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 9-10.

4. Ketanggapan (responsiveness); yang bearti bahwa berbagai lembaga dan prosedur-prosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik; aspiratif,
5. Oreaintasi pada concensus; governace yang baik menjadi perantara kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas,
6. Kesetaraan (equity); semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya, dan
7. Efektifitas dan efesiaensi; penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna.<sup>5</sup>

### 2.1.2 Konsep Pemerintahan Monarkhi

Bentuk Pemerintahan MONARKI (Kerajaan) menurut Leon Duguit dalam bukunya *Traite de Droit Constitutional* membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara bentuk pemerintahan “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun – temurun, maka kita berhadapan dengan Monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun – temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan Republik. Dalam praktik – praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dan republik dapat dibedakan atas:

---

<sup>5</sup> *Yusri manaf.2015. hukum administrasi Negara marpoyan tujuh publishing*

a) Monarki absolut

Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu,, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh Perancis semasa Louis XIV dengan sembojannya yang terkenal L'etat C'est Moi (negara adalah saya).

b) Monarki konstitusional

Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang – undang dasar (konstitusi). Proses monarki konstitusional adalah sebagai berikut:

1. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena takut dikudeta. Contohnya: negara Jepang dengan hak octroon.
2. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contohnya: inggris yang melahirkan Bill of Rights I tahun 1689, Yordania, Denmark, Aarab Saudi, Brunei Darussalam.

c) Monarki parlementer

Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan, eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara (simbol

kekeuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di negara Inggris, Belanda, dan Malaysia.<sup>6</sup>

### 2.1.3. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Michael Hill and Peter Hupe (2002) dalam *Journal of Social Policy* tentang, *Implementing Public Policy*. Implementasi atau *implementation*, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan.<sup>7</sup>

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah kebijakan.<sup>8</sup>

Implementasi kebijakan tidak lepas dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi

<sup>6</sup> <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/tugas%20hk%20tt%20negara.pdf>

<sup>7</sup> Handoyo Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Widya Karya.

<sup>8</sup> Winarno Budi, 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS(Center Of Academic Publishing Service). Yogyakarta.

akan melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.<sup>9</sup>

Hill dan Hupe mengatakan bahwa Implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang dibuat. Disini terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuatan keputusan dan pihak implementor.<sup>10</sup>

Grindle memandang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kegiatan (*linkage*) yang memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasikan sebagai output dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana tertentu dirancang dan di implementasi dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>11</sup>

Sementara itu, setelah me-*review* berbagai penelitian implementasi, menyatakan ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam faktor tersebut adalah:

- 1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.

---

<sup>9</sup> Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR

<sup>10</sup> Handoyo Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Widya Karya.

<sup>11</sup> Winarno Budi, 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS(Center Of Academic Publishing Service). Yogyakarta.

- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan dalam penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan
- 4) Dukungan para *stakeholder*, yakni dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan implementasi program yang di jalankan
- 5) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuandan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut)
- 6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut.

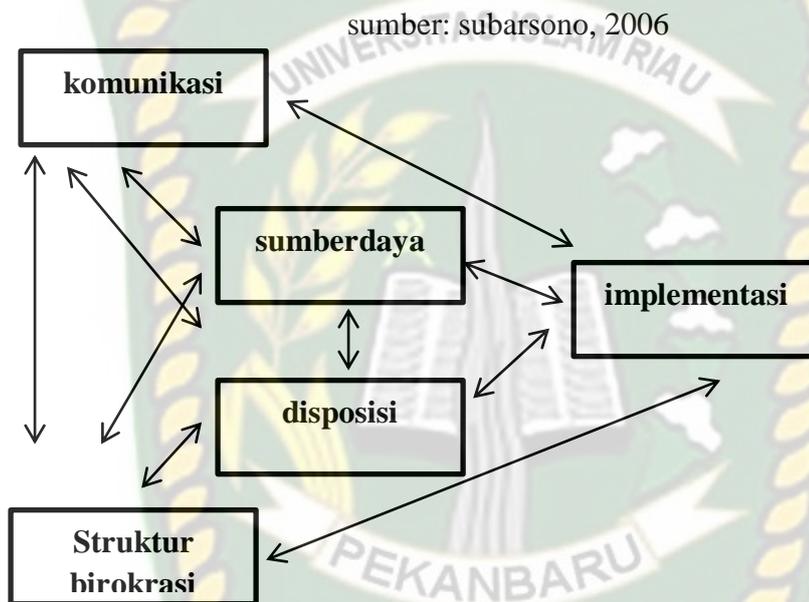
#### **2.1.3.1 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III**

Kebijakan publik merupakan segala keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diterapkan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai. Untuk memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan.

Pelaksanaan implementasi kebijakan memiliki beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi itu. Menurut George Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) *Communication (komunikasi)* ; Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran.
- 2) *Resources (sumber daya)* ; sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
- 3) *Dispotisions or attitude (sikap)* ; merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementator kebijakan haruslah memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu.

4) *Bureaucratic structure (struktur birokrasi)* ; tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.



Gambar II.I : Model Implementasi Edward III

Variabel yang pertama adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada personil yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator

akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Variabel kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Menurut George C Edwards III indikator sumber daya terdiri dari beberapa unsur yaitu :

sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadahi ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C Edward II adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang harus dicermati pada variable disposisi adalah :

**a.** Pengangkatan birokrat ; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakankebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah

ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan publik yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang atau banyak pihak yang terkait, bila struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

#### 2.1.4. Konsep Kebijakan

Pada sistem pemerintahan, selain aparatur birokrat dan lembaga publik juga harus terdapat suatu rumusan kebijakan publik yang merepresentasikan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Perumusan kebijakan haruslah memperhatikan tujuan pemerintahan dan fenomena sosial masyarakat dalam lingkungan tersebut. Di dalam Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” yang dalam bahasa Indonesia berarti apapun juga yang dipilih pemerintah, baik yang akan dikerjakan ataupun tidak dikerjakan (mendamkan), sedangkan Robert Eyestone mengatakan secara luas bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.<sup>12</sup>

Kemudian menurut Budi Winarno juga mengasumsikan bahwa kebijakan merupakan suatu kegiatan beserta konsekuensinya yang banyak berhubungan

---

<sup>12</sup> Winarno Budi, 2007. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta.

dengan mereka yang bersangkutan untuk mencapai suatu keputusan tersendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat dilakukan sendiri ataupun melalui instansi yang lain (baik instansi milik pemerintah ataupun milik swasta), yang mana tujuan dan maksudnya adalah untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat atau dapat dikatakan sebuah kebijakan merupakan pedoman dan pengatur yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan tak lepas juga kaitannya dengan kehidupan nasional yang kondisinya dapat berubah dari waktu ke waktu, ada saatnya jika konflik dapat diredam dengan upaya kesatuan bentuk dalam bentuk segala aspek kehidupan nasional, dan ada saatnya pula dimana konflik perlu dikembangkan dalam kehidupan nasional untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Pada kebijakan pemerintah dalam konteks mikro, dalam proses kebijakan hanya ada tiga komponen yang saling

berinteraksi, antara lain :

- (1) Kebijakan itu sendiri
- (2) pelaku kebijakan, dan
- (3) Lingkungan.

Proses mengubah kebijakan publik menjadi pedoman, rencana, proyek, dan Kegiatan Di mana sumber daya harus dialokasikan untuk organisasi Atau manajemen Implementasi kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Kebijakan public terdiri dari dorongan oleh negara dalam memilih pendekatan yang diinginkan. Pendekatan pilihan yang lahir Dari penetapan tersebut harus diambil kerangka pelaksanaannya. Kegiatan pemerintah dan pelaksanaan Kegiatan pemerintah akan terdiri dari berbagai kegiatan dengan karakteristik dan tujuan tertentu. Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di dalam negeri Kebijakan Publik adalah prinsip penuntun pemikiran rasional dan

Mampu memecahkan masalah adalah menentukan Peraturan tindakan pemerintah menetapkan pedoman masa depan untuk tujuan yang dimaksudkan. Kondisi hasil Ini adalah upaya bertindak untuk melayani kepentingan umum.<sup>13</sup>

Kebijakan publik dapat dipertimbangkan dalam dua dimensi. Kegiatan atau tindakan tata kelola, dan dimensi kedua mengacu pada tarting. Pahami pemerintah dalam artian itu Kebijakan publik mengacu pada pedoman tata kelola. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pedoman. Sejauh ini, pemerintah telah membuat keputusan dan telah menetapkannya sebelumnya untuk menyelamatkan hari. Kegiatan Hmi atau Tindakan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh perencanaan. Simpan catatan proyek, metode manajemen, atau proses yang berjalan untuk tujuan proyek. Prestasi kerja yang benar sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

Proses perumusan kebijakan public Ada 7 langkah penting:

1. Prosedur untuk mempertimbangkan masalah yang akan dipecahkan sebelumnya Akan ada kebijakan. Kemudian harus ada pertimbangan masalahnya Harus direvisi dengan kebijakan itu, tapi Dari satu negara akan punya masalah Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus menemukan dan mengkonsolidasikan masalah dan memprioritaskannya. Penting Akan memperbaiki masalah tersebut Dan putuskan masalah yang paling mendesak Harus diperbaiki oleh Perumusan kebijakan
2. Tahapan mempresentasikan inisiatif adalah Berbagai hal yang menemukan jalan masuknya Penyelesaian masalah Itu dipilih sebagai yang paling penting. Dalam menyarankan ide Dalam hal ini, para pendukung dapat Ada banyak cara untuk menyarankan solusi, seseorang yang mengemukakan ide bisa menjadi tokoh politik. Seorang pejabat tetap atau Siapapun
3. Tahap pencarian, pengumpulan berita, informasi dan berbagai faktor. Ini adalah jaminan bahwa idenya Siapa yang mengusulkan Ini adalah ide Itu dapat diimplementasikan dan masalah dapat diselesaikan dengan sukses sesuai dengan tujuan. Harus ada kumpulan informasi dan faktor masyarakat yang ada atau pada saat mungkin dan cocok. Yang paling nyata
4. Proses penyusunan kebijakan kasar Untuk memproses dan mengumpulkan berbagai faktor Mencari Memutuskan pendapat itu Dimana saja Ini dapat

<sup>13</sup> Kowit puangngam.2001. prinsip dan dimensi baru di masa depan. Bangkok winyuchon

<sup>14</sup> Cuwong cayabut 1999. Tori pemerintah local. Bangkok percetakan local departemen departemen administrasi provinsi

digunakan untuk merumuskan kebijakan dan benar-benar dapat menyelesaikan masalah. Kemudian disusun sebagai langkah pertama, yang kemudian dapat dimodifikasi.

5. Mengedit dan mengubah draf kebijakan Kebijakan di atas sudah dibuat drafnya. Akan ditetapkan sebagai kebijakan Pembuat kebijakan harus mendengarkan pendapat mereka. Sikap dan reaksi dari Orang, kelompok dan organisasi Terkait rancangan kebijakan, terbuka untuk umum dan pemangku kepentingan. Pengaruh telah mengungkapkan pandangan untuk menerima atau tidak menerima kebijakan itu. Ini adalah kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk mengaudit Mengevaluasi dan merevisi kebijakan menjadi benar dan lengkap sehingga proses pembuatan kebijakan menjadi lebih baik.

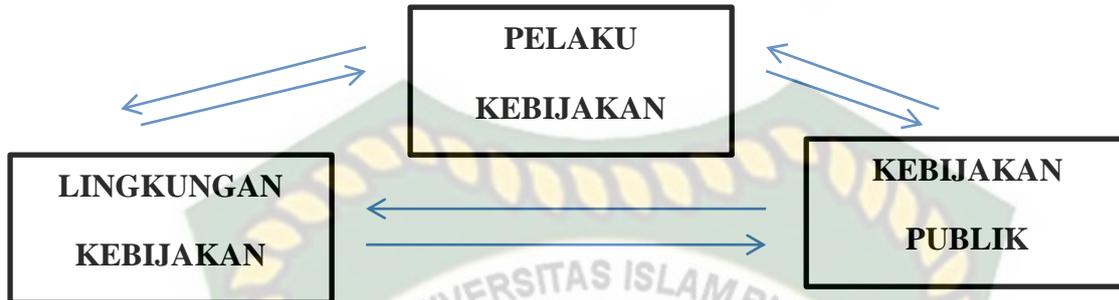
6. Prosedur untuk menyiapkan atau membuat kebijakan setelahnya Draft kebijakan telah direvisi. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk merumuskan suatu kebijakan. Akhirnya, misi pembuatan kebijakan mendekati akhir.

7. Langkah pengumuman kebijakan Diberlakukannya kebijakan tersebut Di akhir proses Tentukan kebijakan dan pertimbangkan Implementasi kebijakan dapat menjadi metode deklarasi. Di parlemen Baik dianggap sebagai pernyataan kebijakan melalui perwakilan rakyat atau diberitahukan langsung kepada publik. Atau melalui Massa atau dokumen pemerintah<sup>15</sup>

Kebijakan adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan disebut *stakeholder*. Kemudian yang dimaksudkan mengenai lingkungan mencakup keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan, sebagaimana yang digambarkan Dunn 1999 (Subarsono, 2005: 15) dalam pola sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Somkid leodpaibun.2005.desentralisasi yudisial kekuasaan kepada pemerintah. Bangkok thammawat university badan pembangunan demokrasi



Gambar II.II lingkungan kebijakan

Terlihat bahwa skema tersebut menunjukkan 3 sub sistem yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam kesatuan sistem tindakan. Terlihat sub system *stakeholder* atau para pelaku kebijakan berinteraksi dengan lingkungan kebijakan dan dengan kebijakan publik yang diperlakukan. Interaksi berlangsung secara timbal balik dalam pengertian *stakeholder* mempengaruhi lingkungan dan juga sebaliknya lingkungan akan mempengaruhi para pelaku kebijakan.

Tampak bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berkaitan yang dibuat oleh pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, keterlibatan pelaku kebijakan yaitu para individu atau kelompok individu akan mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan, dalam aplikasinya pelaksanaan secara strategi dituangkan dalam program kegiatan, lain halnya pendapat Korten dalam (Subarsono, 2013) yang berpendapat bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh tiga aspek

yaitu jenis program, *beneficiaries* ( penerima program ) dan organisasi pelaksana program.<sup>16</sup>

### 2.1.5. Konsep Organisasi

organisasi adalah suatu bentuk persekutuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan bereaksi ke dalam suatu ikatan pengaturan dan keteraturan, dengan memiliki fungsi dan tugas sebagai suatu kesatuan yang mengarah pada pencapaian tujuan serta mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas masing-masing manusia yang terikat dalam persekutuan.<sup>17</sup> Selanjutnya, Prajudi Atmosudirdjo membarikan ulasan tentang organisasi, yaitu “suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih (*sosial entity*) yang dengan sadar bekerja sama secara terpadu (*consciously coordinated*) dalam suatu konteks tertentu, menurut batasan-batasan (*boundaries*) dan fungsi-fungsi tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama tertentu atau suatu perangkat (set off) tujuan-tujuan bersama tertentu”. Dalam bentuk kerja sama ini, dibutuhkan interaksi dan reaksi sosial kehidupan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terpadu dalam suatu konteks tertentu.

---

<sup>16</sup> Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR

<sup>17</sup> Makmur. 2012. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

### 2.1.6. Kosep Manajemen

kata manajemen berasal dari bahasa Italia (1561) *meneggiare* yang berarti “mengendalikan” terutama “mengendalikan kuda” yang berasal dari Bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan”. Kata ini dapat pengaruh dari Bahasa Prancis *manege* yang berarti “kepemilihan kuda” (Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari Bahasa Inggris menjadi *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Selanjutnya istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Manajemen sebagai suatu proses,
2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen; dan
3. Manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (science).<sup>18</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sebagai proses pengarah suatu kelompok orang kearah tujuan organisasional atau maksud yang nyata.

### 2.1.7. Konsep Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Akan tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. desa

---

<sup>18</sup> Nurman. 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.<sup>19</sup>

Desa adalah kesatuan masyarakat yang hidup didalam suatu wilayah yang masih hidup dalam kesamaan (homogeny), masih sangat tergantung dengan alam istiadat setempat. Sebutan untuk desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat 1 Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 63 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam menyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, yakni, “ sebutan untuk desa, kepala desa, badan perwakilan desa dan perangkat desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.”<sup>20</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan satuan pemerintahan yang berada di bawah kabupaten/kota. Akan tetapi, status desa tidak sama dengan kelurahan yang tidak mempunyai hak membenahi dan mengatur segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.

---

<sup>19</sup> Rusyan Tabrani. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

<sup>20</sup> Rauf Rahyunir, Maulidiah. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Riau.

### 2.1.8. konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian pemerintah desa adalah kepala desa beserta perangkat desa dan anggota BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

#### B. Tugas Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas Dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pada itu, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;

- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa, mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik, melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa, membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup<sup>21</sup>

#### **2.1.9. Konsep partisipasi masyarakat**

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok

<sup>21</sup> *Racmat maulana.2014 konsep pemerintahan desa Yogyakarta, Grada Ilmu,2014*

dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan yang kenal dengan The Rio Earth Summit tahun 1992 yang ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan tentang kependudukan, pembangunan, perkotaan, gender, dan pengembangan sosial telah memilih kemitraan sebagai pendekatan sentral untuk mencapai agenda 21 pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1997 dalam pertemuan World Bank dan IMF dinyatakan bahwa keikutsertaan atau partisipasi merupakan agenda pembangunan masyarakat internasional. Dalam forum ekonomi dunia Davos SEkjen PBB menekankan perlunya partisipasi dari dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sebagai inti tujuan PBB.<sup>22</sup>

Berikut ini diketemukan beberapa alasan mengapa partisipasi itu penting dalam proses pembangunan desa.

1. Partisipasi dalam praktek yang sederhana telah lama terbangun dalam pemahaman, kesadaran dan kehidupan masyarakat;
2. Partisipasi memungkinkan perubahan yang lebih besar dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak manusia. Hal ini sulit dilakukan jika perubahan ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau kelompok tertentu yang tindak terlibat langsung;

---

<sup>22</sup> Nurman. 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.

3. Pemecahan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi, kerja sama dan berbagi peran;
4. Menggunakan sumber daya dan pelayanan bagi masyarakat tidak dapat tercapai oleh gagasan yang dibangun oleh pemerintah atau pembuat kebijakan saja, karena sumber daya pendukung lebih banyak dimiliki oleh individu kelompok atau organisasi masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dan kerangka mekanisme pelayanan harus melibatkan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna pelayanan itu;
5. partisipasi merupakan suatu proses melibatkan orang lain terutama kelompok masyarakat yang terkena langsung untuk merumuskan masalah dan mencari solusi secara bersama;
6. Masyarakat memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program yang lebih baik, termasuk tujuan, pengetahuan, situasi, struktur sosial dan pengalaman menggunakan teknologi untuk kepentingannya;
7. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program pembangunan, jika ikut terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya;
8. Dalam kehidupan demokratis, secara umum masyarakat menerima bahwa mereka berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan dan harapan yang ingin dicapai; dan
9. Banyak permasalahan pembangunan dibidang pertanian, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kelembagaan yang tidak mungkin dipecahkan

dengan pengambilan keputusan perorangan. Partisipasi kelompok sasaran dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan.

#### **2.1.8.1. Prinsip partisipasi masyarakat**

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. (DPR,DPD,DPRD).

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan beberapa aspek;

1. Kebebasan berkumpul
2. Mengungkapkan pendapat,
3. Mapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jewell & siegall menyatakan partisipasi adalah keterlibatan organisasi di dalam semua kegiatan organisasi . Handoko menyatakan partisipasi adalah tindakan ikt serta dalam perencanaan, pelaksanaan , dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.

Tujuan partisipasi

1. Untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.
2. Mengantisipasi berbagai isu yang ada.

3. Menyediakan seluruh komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu bicara konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.
4. Untuk merangsang keterlibatan masyarakat

Cara merangsang kerlibatan masyarakat:

1. Melalui perencanaan partisipasi
2. Menyiapkan agenda pembangunan
3. Pemantauan
4. Evaluasi dan pengawasan dengan secara partisipatif
5. Mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Instumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan instumen-instrumen pendokong adalah pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan strategi pembangunan, tata-ruang, program pembangunan, penganggaran, pengadaan dan pemantauan. Menurut Jeff dan Shah menyatakan good governance digunakan untuk melihat partisipasi melalui:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
2. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah
3. Tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah

4. Terjadi sikat masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.<sup>23</sup>

### 2.1.9. Konsep pelaksanaan tugas

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruskan ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinabungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang bearti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe-dan akhiran –an yyang berfungsimmembentuk kata benda menjadi “pelaksanaan” pelaksanaan yaitu:

- 1) Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut Bimtoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- 2) Wiestra, dkk mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dankebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperrlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanakannya dan kapan waktu dimulai.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Yusri munaf.2015. *hukum administrasi Negara. Marpoyan tujuh publishing*

<sup>24</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Grada Ilmu,2011*

- 3) Abdullah mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>25</sup>
- 4) Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
- 5) Pelaksanaan adalah orang yang menggerakkan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.<sup>26</sup>

Berdasarkan batasan yang dikemukakan diatas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata “laksana”.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian tentang partisipasi masyarakat, namun belum ada penelitian yang judulnya persis sama dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang sudah ada dapat disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Hisyam Djihad dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000

<sup>26</sup> W.J.S. Purwadaminto, *Kamus Uum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Nilai Pustaka, 1986

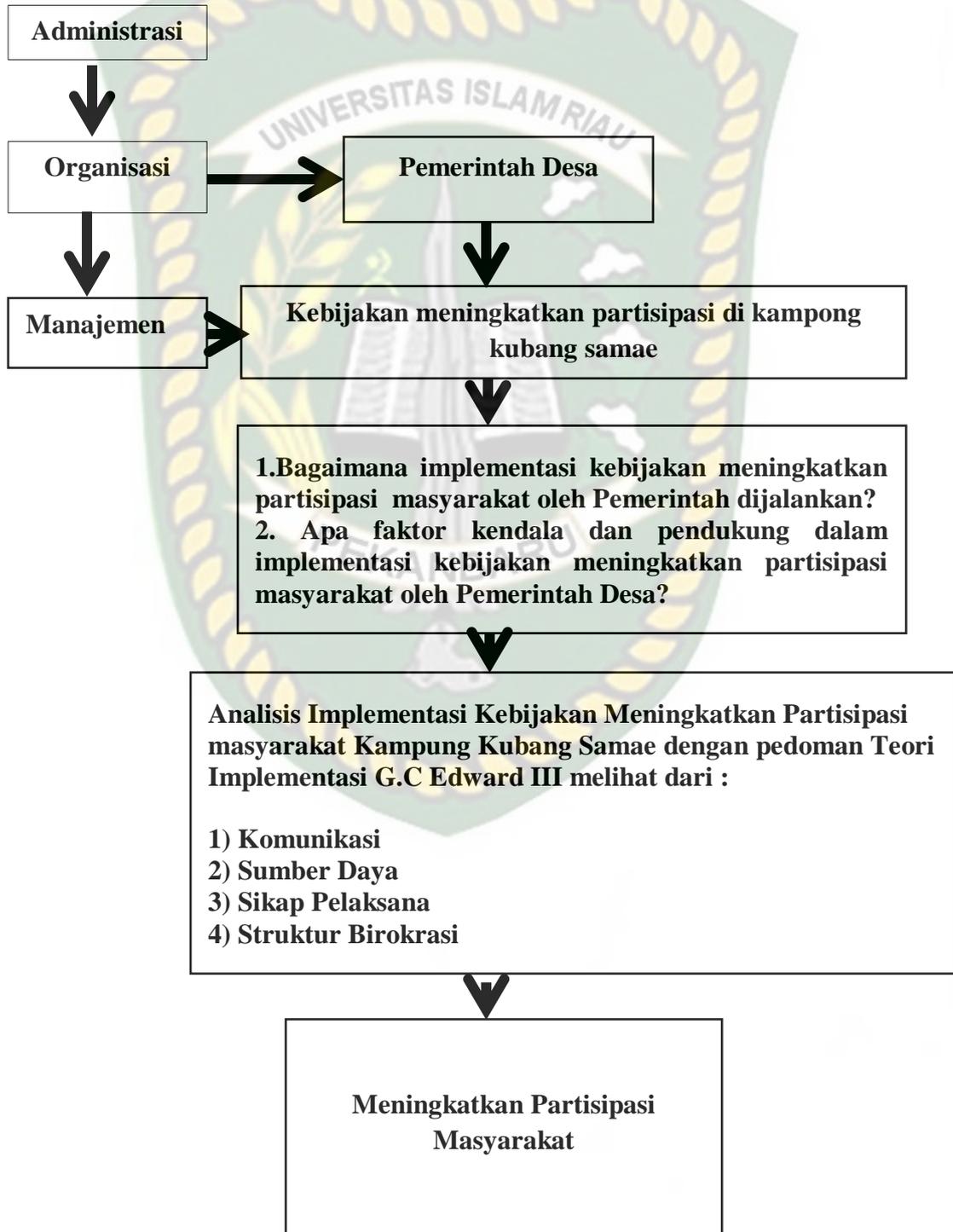
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Tesis/Skripsi
1	2	3
1	Ari Handaya	Peranan Kepala Desa Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Tulang Kabupaten Siak
2	Nurholis	Peranan Kelapa Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan di Desa Dayo Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu
3	Hamdan Hamid	Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
4	Ismail	peranan kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur di desa Pangkalan Batang Kecamatan Bangkalis
5	Syafee-i	Peranan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Blukahili Barat Kecamatan Batong Thailand Selatan
6	Sarah Nuramalia Putri	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi kasus desa balesari kecamatan bansari kabupaten temanggung)
7	Martiana Dwi Rahayu	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastuktur di desa sinasari kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai hal berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pehamaan yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

**Gambar: 2.3. Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.**



### 2.3.1 Konsep Operasional dan Operasional Variabel

#### 2.3.1.1 Konsep Operasional

Kosep operasional merupakan unsur yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable. Dengan kata lain konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variable. Adapun fungsi dari konsep operasional adalah sebagai alat untuk mengidentifikasi fenomena atau gejala-gejala yang diamati dengan jelas, logika, atau penalaran yang digunakan oleh peneliti untuk menerangkan fenomena yang diteliti atau dikaji hasil atau akibat yang diharapkan. Dalam konsep operasional ini peneliti menggunakan teori implentasi G.C Edward III.

##### 1.Communication (komunikasi)

Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran.

##### 2. Resources (sumber daya)

sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau

relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

### 3. Dispositions or attitude (sikap)

merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementor kebijakan haruslah memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu.

### 4. Bureaucratic structure (struktur birokrasi)

tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

#### 2.3.1.2. Konsep operasional Variabel

operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Maka yang menjadi operasionalisasi dalam penelitian adalah pemerintah Muban dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.<sup>27</sup>

konsep operasional variabel ini peneliti menggunakan teori implementasi G.C Edward III.

<sup>27</sup> Singarimbun, Masri. 1995. *Metode penelitian Survei*. LP3S, Jakarta

Implementasi kebijakan (X): tingkat keunggulan implementasi kebijakan yang di berikan pihak pemerintahan desa Tanon selatan Thailand yang sesuai dengan harapan masyarakat.

1. Komunikasi (Communication) X1 yaitu merupakan upaya pemerintahan desa Tanon selatan Thailand untuk menyebarluaskan informasi.
2. Sumber daya (Resources) X2 yaitu merupakan implementator dari kebijakan pemerintahan desa Tanon selatan Thailand yang dikeluarkan.
3. Sikap (Dispositions or attitude) X3 yaitu merupakan sikap implementor pemerintahan desa Tanon selatan Thailand dalam mendukung suatu implementasi kebijakan.
4. Struktur birokrasi (Bureaucratic structure) X4 yaitu tahapan implementasi kebijakan pemerintahan desa Tanon selatan Thailand yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi.

Meningkatakan partisipasi (Y) peningkatan partisipasi masyarakat adalah tingkat perasaan senang atau kecewa masyarakat setelah menbandingkan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.

**Tabel . 2.2 Konsep Operasional Variabel Implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator/ Item penelitian	penilaian
1	2	3	4	5
Menurut Irfan Islamy (1999), menyatakan kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan.	Implementasi kebijakan pemerintah Desa (Variabel X)	1. Komunikasi (Communication) X1	a)Menyebarkan informasi tentang rencana desa. b)Kesesuaian isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat. c) memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat. d) mengambil keputusan melibatkan masyarakat. e)Pengaturan desa dengan membuat peraturan.	1.sangat baik. 2. baik. 3.cukup baik. 4.tidak baik. 5.sangat tidak baik.
		2. Sumber daya (Resources) X2	a) Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan. b) Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan. c) Kecukupan jumlah sarana da prasarana. d) Upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. e) Kompetensi untuk melaksanakan pembangunan	1.sangat baik. 2. baik. 3.cukup baik. 4.tidak baik. 5.sangat tidak baik.

		<p>3. Sikap (Disposition or attitude) X3</p>	<p>a) Penyelenggaraan pemerintah Desa.  b) Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.  c) Membina kehidupan masyarakat Desa.  d) Mengawas dalam setiap kegiatan  e) Keinginan melaksanakan program pembangunan.</p>	<p>1.sangat baik.  2. baik.  3.cukup baik.  4.tidak baik.  5.sangat tidak baik.</p>
		<p>4. Stuktur birokrasi (Bureaucratic structure) X4</p>	<p>a) Membagi tugas dan wewenang program pembangunan desa.  b) Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program.  c) Adanya struktur organisasi pelaksanaan program.  d) Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program.  e) Adanya standar dan prosedur operasional dalam pelaksanaan.</p>	<p>1.sangat baik.  2. baik.  3.cukup baik.  4.tidak baik.  5.sangat tidak baik.</p>

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator/ Item penelitian
1	2	3	4
Variabel dependen (terikat) menurut Sugiyono (2016:39) “Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variable bebas.”	Meningkatkan partisipasi masyarakat (Variabel Y)	Peningkatan Partisipasi masyarakat	4. Ada peningkatan 5. Tidak ada peningkatan

#### 2.4. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap indicator variable penelitian ini menggunakan Skala Likert (Sugiyono, 2003 :107) digunakan untuk mengukur sikap pendapat persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena social. Untuk kategori ukuran untuk menilai pelaksanaan variable beserta indikatornya dibedakan dalam lima kategori yaitu sangat Memuaskan, Memuaskan, Cukup Memuaskan, Kurang Memuaskan dan tidak Memuaskan. Untuk setiap item pertanyaan yang diajukan perindikator Variabel, masing-masing altenatife jawabannya terdiri dari lima kategori dengan nilai skor sebagai berikut ;

**Tabel 2.3 : Skala pengukuran Likret**

No.	Options	Bobot
1.	Sangat Stuju	3
2.	Cukup Stuju	2
3.	Tidak Stuju	1

Pengukuran variabel adalah sebagai berikut ;

Sangat Stuju ; Apabila nilai indikator Implementasi kebijakan pemerintahan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat berada pada nilai > 67-100%

Cukup Stuju ; Apabila nilai indikator Implementasi kebijakan pemerintahan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat berada pada nilai 34-66%

Tidak Stuju ; Apabila nilai indikator Implementasi kebijakan pemerintahan desa dan peningkatan partisipasi masyarakat berada pada nilai < 1-33%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data-data yang benar dan lengkap, maka metode-metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan serta membahas hasil penelitian ini adalah:

#### 3.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kuantitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

#### 3.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampung Kubang Samae tambon Tanon Ampor Mayor Jangwat Pattani selatan Thailand 94140. Hal ini perlunya pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum terlaksana dengan maksimal sehingga masyarakat kurang partisipasi kepada pihak pemerintahan.

### 3.3. Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Dalam suatu penelitian sumber data tertentu mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Populasi bukanlah hanya orang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang karakteristiknya hendak diduga.

Berdasarkan uraian di atas maka Penelitian ini peneliti memilih populasi semua masyarakat kampung Kubang same desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.

#### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang di lakukan sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel.

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat kampung Kubang same desa Tanon jumlah 50 orang dari jumlah orang semua 2,914 orang kemudian peneliti mengambilkan sampel sebanyak 50 orang.

**Tabel 3.1 : Daftar Populasi dan Sampel Mengenai Implementasi kebijakan pemerintahan desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di kampung kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.**

No	Populasi	Responden
1.	Kepala kampung	1
2.	Wakil kepala kampung	1
3.	Tokoh Masyarakat	10
4.	Masyarakat Umum.	38
	<b>Jumlah</b>	<b>50 orang</b>

*Sumber : Data olahan peneliti, 2021*

#### **3.4. Teknik Penarikan Sampel/responden**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu “Sensus”, “Random Sampling” dan “Purposive Sampling”. Dimana teknik “sensus” digunakan untuk kepala kampung, wakil kepala kampung di kampung Kubang Samae Desa Tanon karena jumlah populasi yang sedikit, kemudian penulis menggunakan teknik “Random Sampling” untuk menentukan sampel Tokoh Masyarakat. Dan penulis menggunakan teknik “Purposive Sampling” yaitu teknik pengambilan sampel karena ada pertimbangan atau alasan tertentu untuk menentukan sampel Masyarakat Umum jumlahnya yang cukup besar.

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis dan sumber data dengan dua cara yaitu:

#### 3.5.1. Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang diperlukan untuk mendukung data primer.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas maka dipergunakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara langsung turun kelapangan untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden). Dengan berbicara langsung (face to face) dengan orang tersebut. (Suyanto, 2005; 69)

#### 2) Observasi

Yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek – aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan peran kepala desa.

### 3) Kuesioner

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain secara lisan oleh peneliti. Kuesioner juga menjadi pedoman (pegangan) wawancara bagi peneliti dalam mengumpulkan data.

### 4) Angket

Angket yaitu suatu alat mengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban yang dijawab sendiri oleh responden tanpa di damping.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari Kepala desa, wakil kepala desa, kepala kampung, wakil kepala kampung, tokoh masyarakat, dan masyarakat di Kampung Kubang Samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan sehingga dianggap lebih efektif.

### 5) Dokumentasi

Yaitu salah satu teknik pengambilan data yang menggunakan dokumentasi-dokumentasi baik dari buku-buku maupun gambaran jelas tentang desa penelitian.

### **3.7. Teknik Analisis Dan Keabsahan Data**

Sesuai dengan subjek penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di kampung Kubang Samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.

Maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil angket, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, sehingga mudah dalam dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

#### **3.7.1. Uji Validitas dan Reliabelitas**

Pengujian validitas setiap instrumen pertanyaan yang digunakan dalam analisis item dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir. Pengujian reabilitas adalah pengujian yang berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap alat test (instrument).

#### **3.7.2. Analisis Deskriptif**

Metode deskriptif, yaitu mengolah data, menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah terhadap kepuasan Pengguna Kantor Pos Dusungyo Selatan Thailand kemudian membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang ditemui di lapangan pada saat melakukan penelitian.

### 3.7.3. Analisis Kuantitatif

Metode kuantitatif, yaitu metode penganalisaan yang dilakukan dengan mentabulasikan data yang ada kedalam bentuk angka-angka.

- a. Menentukan regresi linier berganda Dengan mempergunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Dimana :

X1 = Komunikasi (Communication)

X2 = Sumber daya (Resources)

X3 = Sikap (Dispotisions or attitude)

X4 = Struktur birokrasi (Bureaucratic structure)

a = Konstanta

b = Konstanta koefisien regresi

e = Epsilon

- b. Menentukan koefisien korelasi (r). Untuk melihat kuat lemahnya Implementasi kebijakan pemerintah desa dan peningkatan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.
- c. Menentukan koefisien determinasi (R<sup>2</sup> ) Koefisien determinasi (R<sup>2</sup> ) merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar perubahan variabel tak bebas (Y) dapat dipengaruhi variabel bebas (X).
- d. Melakukan uji t yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel bebas (peningkatan partisipasi masyarakat) terhadap

variabel terikat (Implementasi kebijakan pemerintah desa). Uji t akan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, jika t hitung > t tabel maka H1 diterima dan Ho ditolak, tapi jika t hitung < t tabel maka H1 ditolak dan Ho diterima.

### 3.8. Jadwal Penelitian

Perencanaan kegiatan penelitian dimulai bulan Januari tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel jadwal penelitian dibawah ini

**Tabel III.II : Jadwal dan waktu penelitian tentang Implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan.**

No.	Jenis kegiatan	Bulan / Minggu															
		Januari 2021				februari 2021				Maret 2021				April 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X													
2.	Saminar Usulan Penelitian				X												
3.	Riset					X	X	X									
4.	Penelitian Lapangan								X	X							
5.	Pengolahan Dan Analisis Data										X	X	X				
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis											X	X	X	X		
7.	Ujian Tesis																X

*Sumber : Data Olahan Penulis, 2021*

### 3.9.Rencana Sistematis Laporan Usulan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk tesis ini dibahas dalam 5 bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain yaitu:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi proposal tesis meliputi latar belakang definisi masalah, rumusan masalah, batasan ,asalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

#### BAB II : KAJIAN PERPUSTAKAAN

Dalam bab ini dikemukakan dengan jelas, ringkas, dan padat tentang konsep teori, ulusan karya, kemudian menguraikan kerangka pemikiran, konsep operasional, dan operasional variable dan menyatakan hipotesis.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

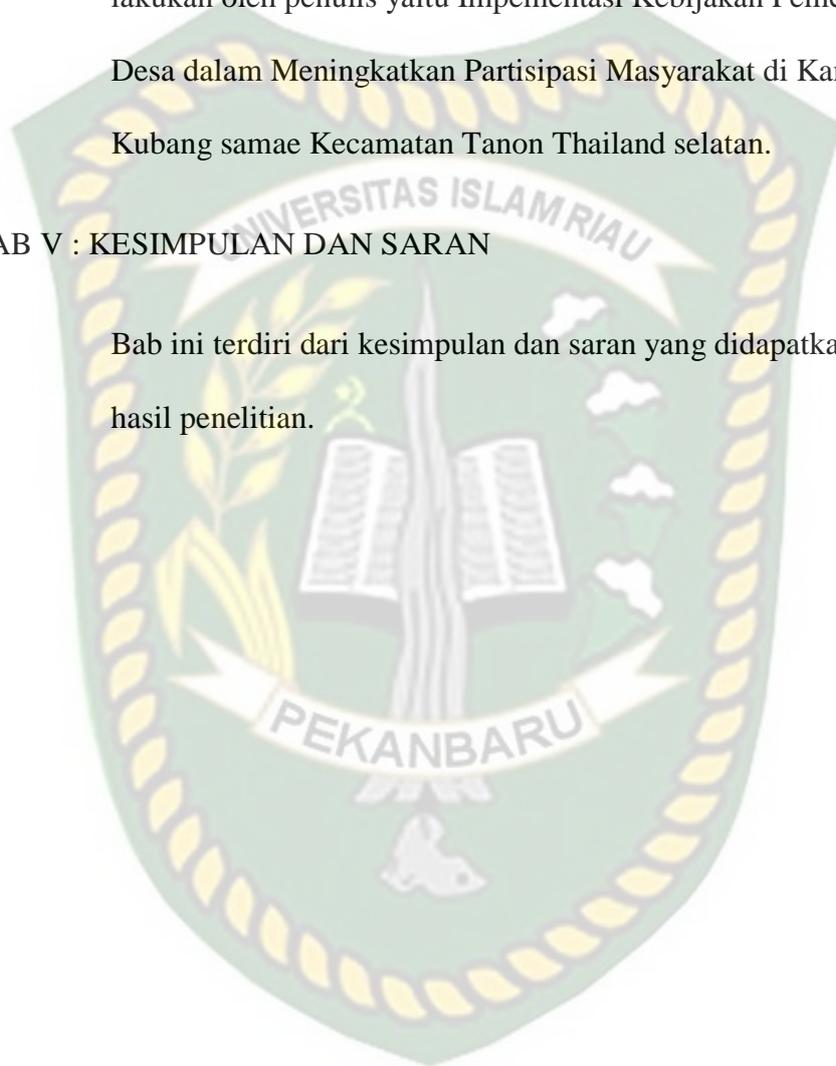
Dalam bab ini diuraikan tentang : Tipe penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data,rancangan sistematika penulisan, dan jadwal penelitian

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis yaitu Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang samae Kecamatan Tanon Thailand selatan.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Identitas Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah kepala kampung, wakil kepala kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand. Adapun sampel diambil sebanyak 50 orang. Sebelum membahas tentang bagaimana tanggapan responden mengenai Implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand, berikut ini diuraikan tentang karekteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan pendidikan.

##### 4.1.1. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melihat tentang jenis kelamin responden pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1 : Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah (orang)
Lelaki	30
Perempuan	20
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

*Data : Olahan penelitian 2021*

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand responden berjenis kelamin Lelaki sebanyak 30 orang dari 50 orang responden dan responden perempuan dengan jumlah 20 orang. Dapat diambil kesimpulan bahwa Laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

#### 4.1.2. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis usia

Untuk melihat lebih lanjut tingkat usia responden pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand sebagai - bagai tingkatan bisa lihat dalam table 4.2 berikut ini :

**Table 4.2. : Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis usia**

<b>Jenis usia (Tahun)</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
Dibawah 20	1
21-30	25
31-40	13
41-50	10
51-60	1
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

*Data: Olahan penelitian 2021*

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jenis usia responden pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand responden berjenis usia dibawah 20 tahun sebanyak 1 orang dari responden 50 orang, responden usia dari 21-30 tahun sebanyak 25 orang dari responden 50 orang, responden usia

dari 31- 40 tahun sebanyak 13 orang dari responden 50 orang, responden usia dari 41- 50 tahun sebanyak 10 dari responden 50 orang, kemudian responden usia dari 51- 60 tahun sebanyak 1 orang dari responden 50 orang.

Dapat diambil kesimpulan bahwa responden dari usia 21-30 tahun yang lebih tinggi dari responden yang tingkat usia lainnya.

#### 4.1.3. Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk melihat lebih lanjut tentang tingkat pendidikan responden pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3. Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Jenis pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
SD	3
SMP	12
SMA	14
Pengguruan Tinggi	21
Lain – lain	-
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

*Data : Olahan penelitian 2021*

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jenis tingkat pendidikan responden pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand responden berjenis tingkat pendidikan SD sebanyak 3 orang dari responden 50 orang, responden berjenis tingkat pendidikan SMP sebanyak 12 orang dari responden 50 orang, responden berjenis tingkat pendidikan SMA sebanyak 14 orang dari

responden 50 orang, responden berjenis tingkat pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 21 orang dari responden 50 orang.

Dapat diambil kesimpulan bahwa responden dari tingkat pendidikan perguruan tinggi yang lebih tinggi dari tingkat pendidikan lainnya.

#### 4.1.4. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Untuk melihat lebih lanjut tentang jenis pekerjaan responden pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jenis pekerjaan	Jumlah (orang)
Siswa / Mahasiswa	19
Pemerintah / Perusahaan Negara	2
Karyawan perusahaan / Karyawan	10
Bisnis Pribadi	19
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>

*Data : Olahan penelitian 2021*

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan responden pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand responden berjenis tingkat pekerjaan Siswa / Mahasiswa sebanyak 19 orang dari jumlah responden 50 orang, responden berjenis tingkat pekerjaan Pemerintah / Perusahaan Negara sebanyak 2 orang dari jumlah responden 50 orang, responden berjenis tingkat pekerjaan Karyawan perusahaan / Karyawan sebanyak 10 orang

dari jumlah responden 50 orang, responden berjenis tingkat pekerjaan Bisnis Pribadi sebanyak 19 orang dari jumlah responden 50 orang.

Dapat diambil kesimpulan bahwa responden dari tingkat pekerjaan bisnis pribadi yang lebih tinggi dari tingkat pekerjaan yang lainnya.

#### **4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Desa Tanon merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Mayor, Kecamatan Mayor terdiri dari 13 desa, yaitu Desa Mayor, Desa Tanon, Desa Trang, Desa Krakwak, Desa Lubok yerai, Desa Langa, Desa Krasok, Desa Kokjan, Desa Pakdo, Desa Sakhobon, Desa Sakhotai, Desa Sakam, dan Desa Panan. Dari ke 13 Desa yang ada Kecamatan Mayor tersebut, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah desa Tanon yang lokasinya lebih kurang 3 km dari jalan raya, yang menghubungkan antara Desa Tanon dengan Desa Sakam melalui transportasi darat. Walaupun Kecamatan Mayor secara umum tidak terdapat gunung namun dalam daerah Kecamatan Mayor secara umum dan Desa Sungai Jalau secara khusus merupakan daerah yang relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Banyaknya sungai-sungai kecil yang ada dalam kawasan ini, dan juga dilalui oleh alur sungai yaitu sungai Mayor. Desa Tanon ini terbentuk memanjang mengikuti aliran sungai Mayor. Desa Tanon berjarak sekitar 5 km dari Ibu kota Kecamatan yaitu Kampung Mayor, 30 km dari Ibu Kota Provinsi yaitu Patani, dan sekitar 1250 km dari Ibu Kota Negara yaitu Bangkok, Adapun batas-batas wilayah Desa Tanon:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Krasok.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Des Sakam.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Krawak.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mayor

### **Komposisi Penduduk**

#### **4.2.1. Jumlah Penduduk**

Berbicara masalah penduduk, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah bahwa penduduk di samping sebagai objek pembangunan, juga merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu masalah penduduk perlu mendapatkan perhatian yang begitu serius dari semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri. Menurut data yang ada di kantor Desa Tanon sampai awal tahun 2020, penduduk Desa Tanon berjumlah 2914 jiwa atau sebanyak 664 KK. Dengan perincian laki-laki sebanyak 1492 jiwa perempuan sebanyak 1422 jiwa bayi samapi usia 6 tahun 384 jiwa. Adapun Desa Tanon yang menjadi obyek penelitian ini yaitu di kampung Kubang samae.

Adapun desa Tanon terbagi menjadi 4 mukim/kampung yaitu:

- a. Mukim 1 kampung Tanon
- b. Mukim 2 kampung Kubang samae
- c. Mukim 3 kampung Duwa
- d. Mukim 4 kampung Tanon tok

#### 4.2.2. Penduduk Menurut Jenis kelamin

Untuk lebih terperinci dan terorganisirnya jumlah penduduk, pada umumnya para ahli monografi biasanya membagi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui komposisi penduduk serta perkembangan dan lajunya tingkat pertumbuhan penduduk serta perkembangan dan lajunya tingkat pertumbuhan penduduk yang mengacu pada pembagian kerja secara jenis kelamin. Berdasarkan analisis di atas maka penulis dalam penelitian ini mencoba membagi komposisi penduduk Desa Tanon berdasarkan jenis kelamin, hal ini penulis maksudkan agar penulis benar-benar mendapat suatu analisis yang faktual berdasarkan asumsi dan tujuan dari penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.5. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	1492
2.	Perempuan	1422

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanon, 2020.*

Tabel di atas dapat memperlihatkan bahwa komposisi jumlah penduduk Desa Tanon berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 1492 jiwa. Sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 1422 jiwa. Ini berarti bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin Perempuan.

#### 4.2.3. Penduduk Menurut Golongan Umur

Dalam suatu penelitian ilmiah yang menggunakan metode dan sistem analisis lapangan yang faktual (studi kasus) biasanya para peneliti membagi komposisi dan jumlah penduduk berdasarkan tingkat atau golongan umur, hal ini dimaksudkan agar penulis dapat membedakan dan mengelompokkan jumlah penduduk produktif yang berorientasi pada kecenderungan jenis pekerjaan yang dilakukan. Substansi dari semua ini mengarah pada dinamika khusus yang lebih terperinci berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.6 Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

NO.	KELOMPOK UMUR	FREKUENSI
1.	0-5	375
2.	6-11	501
3.	12-21	604
4.	22-35	675
5.	36-55	640
6.	36>	119
<b>JUMLAH</b>		<b>2914</b>

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanon, 2020*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk yang paling banyak adalah yang berada pada kelompok umur 36-55 tahun, kemudian kelompok umur 22-35 tahun, kemudian kelompok umur 12-21 tahun, seterusnya 6-11 tahun, kemudian 0-5 tahun dan yang paling sedikit jumlahnya adalah penduduk dengan kelompok umur 56 tahun ke atas. Dari data di atas dapat di katakan bahwa di Desa Tanon sebagian besar penduduknya adalah berada dalam usia produktif.

#### 4.2.4. Agama

Jika ditinjau dari agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sungai Jalau maka bisa dikatakan bahwa masyarakat tersebut adalah pemeluk agama islam seratus persen, mereka dalam agama sangat fanatik, walaupun diketahui masih banyak yang tak melaksanakan ajaran agama seperti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka akan sangat tersinggung jika ada orang yang melecehkan agama mereka.

#### 4.2.5. Mata Pencaharian

Penduduk Desa Tanon pada umumnya bekerja sebagai petani, ini disebabkan oleh faktor geografis yang sangat menunjang. disamping itu juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan penduduk sehingga mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan lain. Jenis pertanian yang dominan di desa ini adalah pertanian perkebunan terutama perkebunan karet dan kelapa sawit kemudian pertanian sawah, tegalan, sayuran atau palawija. Untuk pekerjaan di sektor lain seperti pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang atau wiraswasta dan jenis pekerjaan lainnya sedikit sekali jumlahnya.

#### 4.2.6 Struktur pemerintahan desa

Gambar 4.1 struktur pemerintahan desa di desa Tanon kecamatan Mayor

Thailnd selatan.



Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tanon, 2020

### 4.3. Hasil Penelitian

#### 4.3.1. Analisis Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak lepas dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group). Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa

Fenomena pelaksanaan kebijakan pemerintah desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand dapat dilihat yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), sikap (dispositions or attitude), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) di segi implementasi kebijakan dapat di lihat dari bagai mana pihak pemerintahan desa Tanon selatan Thailand melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand.

##### 4.3.1.1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas

informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator komunikasi (*communication*) pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand dapat di lihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Tanggapan Responden Mengenai pemerintah desa menyebar informasi tentang perencana desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	31	5	155
2.	Baik	15	4	60
3.	Cukup Baik	3	3	9
4.	Tidak Baik	1	2	2
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>226</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>90.4</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.7 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa menyebar informasi tentang perencana desa Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 31 orang dengan total skor sebesar 155, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 15 orang dengan total skor sebesar 60, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 3 orang dengan total skor sebesar 9, selanjutnya yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor

sebesar 2, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa menyebar informasi tentang perencana desa pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. Menyebar informasi oleh pemerintah desa juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut. Menyebar informasi oleh pemerintah desa tentu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat dapat mengetahui semua informasi-informasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang melibatkan masyarakat pemerintah harus mengasih informasi kepada masyarakat..

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kesesuaian isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat oleh pemerintahan desa kepada masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**

**Tanggapan Responden Mengenai mengenai Kesesuaian isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat oleh pemerintahan desa kepada masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	13	5	65
2.	Baik	31	4	124
3.	Cukup Baik	6	3	18
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>207</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>

<b>% Skor Jawaban</b>	<b>82.8</b>
<b>Kriteria</b>	<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.8 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai mengenai Kesesuaian isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat oleh pemerintahan desa kepada masyarakat Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 13 orang dengan total skor sebesar 65, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 31 orang dengan total skor sebesar 124, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 6 orang dengan total skor sebesar 18, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai Kesesuaian isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat oleh pemerintahan desa kepada masyarakat pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. Kesesuaian isi pesan sosialisasi oleh pemerintah desa juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut. Kesesuaian isi pesan sosialisasi oleh pemerintah desa tentu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat dapat mengetahui semua informasi-informasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pemmerintahan yang melibatkan masyarakat pemerintah harus Menyesuaikan isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**

**Tanggapan Responden Mengenai mengenai pemerintahan desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	21	5	105
2.	Baik	18	4	72
3.	Cukup Baik	10	3	30
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	1	1	1
<b>Total Skor</b>				<b>208</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>83.2</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.9 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai mengenai pemerintahan desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 21 orang dengan total skor sebesar 105, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 18 orang dengan total skor sebesar 72, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 10 orang dengan total skor sebesar 30, selanjutnya yang mengtakan sangat tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 1, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintahan desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. pemerintahan desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut. pemerintahan desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat desa tentu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat dapat mengeluarkan semua pendapat-pendapat dan informasi-informasi yang ingin menyampaikan kepada pemerintahan desa oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang melibatkan masyarakat pemerintah harus Membarikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengeluarkan pendapat permasalahan yang masyarakat tempuh.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**

**Tanggapan Responden Mengenai mengenai pemerintahan desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	16	5	80
2.	Baik	21	4	84
3.	Cukup Baik	12	3	36
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	1	1	1

<b>Total Skor</b>	<b>201</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>	<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>	<b>80.4</b>
<b>Kriteria</b>	<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.10 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 16 orang dengan total skor sebesar 80, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 21 orang dengan total skor sebesar 84, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 12 orang dengan total skor sebesar 36, selanjutnya yang mengatakan sangat tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 1, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintahan desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. pemerintahan desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut. pemerintahan desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat tentu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. karena masyarakat dapat mengetahui semua informasi-informasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pemmerintahan yang melibatkan masyarakat pemerintah harus Mengambil keputusan melibatkan masyarakat.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa membuat Pengaturan desa dengan membuat peraturan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**

**Tanggapan Responden Mengenai mengenai pemerintahan desa membuat Pengaturan desa dengan membuat peraturan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	17	5	85
2.	Baik	23	4	92
3.	Cukup Baik	9	3	27
4.	Tidak Baik	1	2	2
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>206</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>82.4</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.11 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa membuat Pengaturan desa dengan membuat peraturan Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 17 orang dengan total skor sebesar 85, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 23 orang dengan total skor sebesar 92, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 9 orang dengan total skor sebesar 27, selanjutnya yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 2, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintahan desa membuat Pengaturan desa dengan membuat peraturan pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. pemerintahan desa membuat Pengaturan desa dengan membuat peraturan juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut. pemerintahan desa membuat Pengaturan desa dengan membuat peraturan tentu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. karena masyarakat dapat mengetahui semua informasi-informasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pemmerintahan yang melibatkan masyarakat pemerintah harus membuat Pengaturan desa dengan membuat peraturan.

*Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusankeputusan pelaksanaan sebelumnya.

Berikut ini dapat dilihat tabel rekapitulasi dari analisis Implementasi kebijakan dengan indikator yaitu : Komunikasi (*Communication*).

**Tabel 4.12**  
**Rekapitulasi Dimensi dan Indikator**

<b>Demensi</b>	<b>Indicator</b>	<b>Total Skor (%)</b>
Komunikasi (Communication)	Pemerintah desa Menyebar informasi tentang rencana desa	90.4
	Pemerintah desa Kesesuaian isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat	82.8
	Pemerintah desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat	83.2
	Pemerintah desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat	80.4
	Pemerintah desa Pengaturan desa dengan membuat peraturan	82.4
<b>Total</b>		<b>419.2</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>83.8</b>

**Sumber : data Olahan**

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai faktor Komunikasi (*Communication*) pada masyarakat di kampung Kubang same desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand. diperoleh jumlah klesuruhan skor yaitu 419.2 dengan rata-rata skor yaitu 83.8% berarti dalam kategori sangat setuju.

#### **4.3.1.2. Resources (sumber daya)**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut

tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

#### 4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**

**Tanggapan Responden Mengenai mengenai pemerintahan desa Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	13	5	65
2.	Baik	26	4	104
3.	Cukup Baik	10	3	30
4.	Tidak Baik	1	2	2
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>201</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>80.4</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.13 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat

baik sebanyak 13 orang dengan total skor sebesar 65, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 26 orang dengan total skor sebesar 104, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 10 orang dengan total skor sebesar 30, selanjutnya yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 2, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintahan desa Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. pemerintahan desa membuat Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa Menyediakan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.14**

**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintahan desa Menyediakan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	23	5	115
2.	Baik	19	4	76
3.	Cukup Baik	7	3	21
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	1	1	1
<b>Total Skor</b>				<b>213</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>85.2</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

Dari Tabel 4.13 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintahan desa Menyediakan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 23 orang dengan total skor sebesar 115, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 19 orang dengan total skor sebesar 76, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 7 orang dengan total skor sebesar 21, selanjutnya yang mengatakan sanagat tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 1, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintahan desa Menyediakan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. pemerintahan desa Menyediakan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Kecukupan sarana dan prasarana pembangunann di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.15**  
**Tanggapan Responden Mengenai Kecukupan sarana dan prasarana**  
**pembangunann di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor**  
**Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	18	5	90
2.	Baik	22	4	88
3.	Cukup Baik	10	3	30
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>208</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>83.2</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.15 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Kecukupan sarana dan prasarana pembangunann Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 18 orang dengan total skor sebesar 90, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 22 orang dengan total skor sebesar 88, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 10 orang dengan total skor sebesar 30, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai Kecukupan sarana dan prasarana pembangunann pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik Kecukupan sarana dan prasarana pembangunann juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Upaya pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.16**  
**Tanggapan Responden Mengenai Upaya pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	23	5	115
2.	Baik	17	4	68
3.	Cukup Baik	8	3	24
4.	Tidak Baik	2	2	4
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>211</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>84.4</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.16 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai Upaya pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 23 orang dengan total skor sebesar 115, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 17 orang dengan total skor sebesar 68, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 8 orang dengan total skor sebesar 24, selanjutnya yang menyatakan tidak baik sebanyak 2 orang dengantotal skor 4, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai Upaya pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat pada kampung

Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik Upaya pemerintahan memenuhi kebutuhan masyarakat juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa berkompetensi untuk melaksanakan pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.17**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Berkompetensi untuk melaksanakan pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	19	5	95
2.	Baik	23	4	92
3.	Cukup Baik	7	3	21
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	1	1	1
<b>Total Skor</b>				<b>209</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>83.6</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.17 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa berkompetensi untuk melaksanakan pembangunan Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 19 orang dengan total skor sebesar 95, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 23 orang dengan total skor sebesar 92, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 7 orang dengan total skor sebesar 21,

selanjutnya yang mengatakan sangat tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 1, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa berkompetensi untuk melaksanakan pembangunan pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah desa berkompetensi untuk melaksanakan pembangunan juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikut ini dapat dilihat tabel rekapitulasi dari analisis Implementasi kebijakan dengan indikator yaitu : Sumber daya (*Resources*).

**Tabel 4.18**  
**Rekapitulasi Dimensi dan Indikator**

<b>Demensi</b>	<b>Indicator</b>	<b>Total Skor (%)</b>
Sumber daya ( <i>Resources</i> )	Pemerintah Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan	80.4
	Pemerintah desa menyediakan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan	85.2
	Kecukupan sarana dan prasarana pembangunann	83.2
	Pemerintah desa berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat	84.4
	Pemerintah desa berkompetensi untuk melaksanakan pembangunan	83.6
<b>Total</b>		<b>416.8</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>83.3</b>

**Sumber : data Olahan**

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai faktor Sumber daya (*Resources*) pada masyarakat di kampung Kubang same desa

Tanon kecamatan Mayor selatan thailand. diperoleh jumlah kessleruhan skor yaitu 416.8 dengan rata-rata skor yaitu 83.3% berarti dalam kategori sangat setuju.

#### 4.3.1.3. *Dispotisions or attitude (sikap)*

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Menyelanggarakan pemerintahan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.19**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Menyelenggarakan pemerintahan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	18	5	90
2.	Baik	19	4	76
3.	Cukup Baik	12	3	36
4.	Tidak Baik	1	2	2
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>204</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>81.6</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.19 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Menyelenggarakan pemerintahan desa Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 18 orang dengan total skor sebesar 90, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 19 orang dengan total skor sebesar 76, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 12 orang dengan total skor sebesar 36, selanjutnya yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 2, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Menyelenggarakan pemerintahan desa pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah desa Menyelenggarakan pemerintahan desa juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Menyelanggarakan urusan kemasyarakatan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.20**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Menyelanggarakan urusan kemasyarakatan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	20	5	100
2.	Baik	23	4	92
3.	Cukup Baik	6	3	18
4.	Tidak Baik	1	2	2
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>212</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>84.8</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.20 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Menyelanggarakan urusan kemasyarakatan Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 20 orang dengan total skor sebesar 100, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 23 orang dengan total skor sebesar 92, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 6 orang dengan total skor sebesar 18, selanjutnya yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 2, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Menyelanggarakan urusan kemasyarakatan pada

kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah desa Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Membina kehidupan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.21**

**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Membina kehidupan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	22	5	110
2.	Baik	16	4	64
3.	Cukup Baik	10	3	30
4.	Tidak Baik	2	2	4
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>208</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>83.2</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.21 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Membina kehidupan desa Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 22 orang dengan total skor sebesar 110, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 16 orang dengan total skor sebesar 64, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 10 orang dengan total skor sebesar 30, selanjutnya yang

mengatakan tidak baik sebanyak 2 orang dengan total skor 4, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Membina kehidupan desa pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah desa Membina kehidupan desa juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Mengawas dalam setiap kegiatan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.22**

**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Mengawas dalam setiap kegiatan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	16	5	80
2.	Baik	20	4	80
3.	Cukup Baik	13	3	39
4.	Tidak Baik	1	2	2
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>201</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>80.4</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.22 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Mengawas dalam setiap kegiatan Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 16

orang dengan total skor sebesar 80, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 20 orang dengan total skor sebesar 80, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 13 orang dengan total skor sebesar 39, selanjutnya yang mengatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 2, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Mengawas dalam setiap kegiatan pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah desa Mengawas dalam setiap kegiatan juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa ada Keinginan melaksanakan program pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.23**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa ada Keinginan melaksanakan program pembangunan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	19	5	95
2.	Baik	24	4	96
3.	Cukup Baik	7	3	21
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>212</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>84.8</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

Data : Olahan

Dari Tabel 4.23 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa ada Keinginan melaksanakan program pembangunan Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 19 orang dengan total skor sebesar 95, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 24 orang dengan total skor sebesar 96, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 7 orang dengan total skor sebesar 21, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa ada Keinginan melaksanakan program pembangunan pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah desa ada Keinginan melaksanakan program pembangunan juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikut ini dapat dilihat tabel rekapitulasi dari analisis Implementasi kebijakan dengan indikator yaitu : Dispotisions or attitude (*sikap*)

**Tabel 4.24**  
**Rekapitulasi Dimensi dan Indikator**

<b>Demensi</b>	<b>Indicator</b>	<b>Total Skor (%)</b>
Sikap ( <i>Dispotisions or attitude</i> )	Pemerintah desa Menyelenggarakan pemerintahan desa	81.6
	Pemerintah desa Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan	84.8
	Pemerintah desa Membina kehidupan desa	83.2
	Pemerintah desa Mengawas dalam setiap kegiatan	80.4

	Pemerintah ada Keinginan melaksanakan program pembangunan	84.8
<b>Total</b>		<b>414.8</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>82.9</b>

**Sumber : data Olahan**

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai faktor Sikap (*Dispotisions or attitude*) pada masyarakat di kampung Kubang same desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand. diperoleh jumlah kesusruhan skor yaitu 414.8 dengan rata-rata skor yaitu 82.9% berarti dalam kategori sangat setuju.

#### **4.3.1.4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Membagi tugas dan wewenang program pembangunan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.25**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Membagi tugas dan wewenang program pembangunan desa di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	18	5	90
2.	Baik	26	4	104
3.	Cukup Baik	4	3	12
4.	Tidak Baik	2	2	4
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>210</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>84</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.25 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Membagi tugas dan wewenang program pembangunan desa Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 18 orang dengan total skor sebesar 90, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 26 orang dengan total skor sebesar 104, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 4 orang dengan total skor sebesar 12, selanjutnya yang menyatakan tidak baik sebanyak 2 orang dengan total skor sebesar 4, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Membagi tugas dan wewenang program pembangunan pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah Membagi tugas dan wewenang

program pembangunan juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.26**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	18	5	90
2.	Baik	22	4	88
3.	Cukup Baik	10	3	30
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>208</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>83.2</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.26 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 18 orang dengan total skor sebesar 90, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 22 orang dengan total skor sebesar 88, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 10 orang dengan total skor sebesar 30,

kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah desa Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut. Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.27**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	21	5	105
2.	Baik	22	4	88
3.	Cukup Baik	7	3	21
4.	Tidak Baik	-	2	-
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>214</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>85.6</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.27 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan program Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan

jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 21 orang dengan total skor sebesar 105, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 22 orang dengan total skor sebesar 88, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 7 orang dengan total skor sebesar 21, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan program pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik pemerintah desa Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan program juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.28**

**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	18	5	90
2.	Baik	22	4	88
3.	Cukup Baik	9	3	27
4.	Tidak Baik	1	2	2
5.	Sangat Tidak Baik	-	1	-
<b>Total Skor</b>				<b>207</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>82.8</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

Dari Tabel 4.28 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 18 orang dengan total skor sebesar 90, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 22 orang dengan total skor sebesar 88, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 9 orang dengan total skor sebesar 27, selanjutnya yang menyatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor sebesar 2, kemudian tidak ada tanggapan responden yang menyatakan sangat tidak baik.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Adanya standard dan prosedur dalam pelaksanaan di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Thailand selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.29**  
**Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah desa Adanya standard dan prosedur dalam pelaksanaan m di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand.**

No.	Klasifikasi jawaban	Frekuensi	Skor	Total Skor
1.	Sangat Baik	21	5	105
2.	Baik	18	4	72
3.	Cukup Baik	9	3	27
4.	Tidak Baik	1	2	2
5.	Sangat Tidak Baik	1	1	1
<b>Total Skor</b>				<b>207</b>
<b>Skor Max 5 x 50</b>				<b>250</b>
<b>% Skor Jawaban</b>				<b>82.8</b>
<b>Kriteria</b>				<b>Sangat Setuju</b>

**Data : Olahan**

Dari Tabel 4.29 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pemerintah desa Adanya standard dan prosedur dalam pelaksanaan Pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dengan jumlah Responden 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan sangat baik sebanyak 21 orang dengan total skor sebesar 105, sedangkan responden yang menyatakan baik sebanyak 18 orang dengan total skor sebesar 72, selanjutnya yang menyatakan cukup baik sebanyak 9 orang dengan total skor sebesar 27, selanjutnya yang menyatakan tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor sebesar 2, selanjutnya yang menyatakan sangat tidak baik sebanyak 1 orang dengan total skor 1.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai pemerintah desa Adanya standard dan prosedur dalam pelaksanaan pada kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand yaitu dalam kategori sangat baik. Adanya standard dan prosedur dalam pelaksanaan

juga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung tersebut.

Berikut ini dapat dilihat tabel rekapitulasi dari analisis Implementasi kebijakan dengan indikator yaitu : Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

**Tabel 4.30**  
**Rekapitulasi Dimensi dan Indikator**

<b>Demensi</b>	<b>Indicator</b>	<b>Total Skor (%)</b>
Struktur Birokrasi ( <i>Bureucratic Structure</i> )	Pemerintah desa Membagi tugas dan wewenang program pembangunan desa	84
	Pemerintah desa Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program	83.2
	Pemerintah desa Adanya struktur organisasi pelaksanaan program	85.6
	Pemerintah desa Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program	82.8
	Pemerintah desa adanya standard dan prosedur dalam pelaksanaan	82.8
<b>Total</b>		<b>418.4</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>83.6</b>

**Sumber : data Olahan peneliti 2021**

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai faktor Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*) pada masyarakat di kampung Kubang same desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand. diperoleh jumlah ksluruhan skor yaitu 418.4 dengan rata-rata skor yaitu 83.6% berarti dalam kategori sangat setuju.

Berikut ini dapat dilihat tabel rekapitulasi dari analisis implementasi kebijakan sebagai berikut :

**Tabel 4.31**  
**Rekapitulasi Dimensi dan Indikator variable Implementasi Kebijakan**

<b>Dimensi</b>	<b>Indicator</b>	<b>Total Skor %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Komunikasi (Communication)	Pemerintah desa Menyebarkan informasi tentang rencana desa	90.4
	Pemerintah desa Kesesuaian isi pesan sosialisasi terhadap masyarakat	82.8
	Pemerintah desa Memberi kesempatan masyarakat mengeluarkan pendapat	83.2
	Pemerintah desa Mengambil keputusan melibatkan masyarakat	80.4
	Pemerintah desa Pengaturan desa dengan membuat peraturan	82.4
<b>Total</b>		<b>419.2</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>83.8</b>
Sumber daya (Resources)	Pemerintah Menyusun perancangan sesuai dengan kebutuhan	80.4
	Pemerintah desa menyediakan Kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan	85.2
	Kecukupan sarana dan prasarana pembangunann	83.2
	Pemerintah desa berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat	84.4
	Pemerintah desa berkompetensi untuk melaksanakan pembangunan	83.6
<b>Total</b>		<b>416.8</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>83.3</b>
Sikap (Dispotisions or attitude)	Pemerintah desa Menyelenggarakan pemerintahan desa	81.6
	Pemerintah desa Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan	84.8
	Pemerintah desa Membina kehidupan desa	83.2
	Pemerintah desa Mengawas dalam setiap kegiatan	80.4
	Pemerintah ada Keinginan melaksanakan program pembangunan	84.8
<b>Total</b>		<b>414.8</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>82.9</b>

1	2	3
Struktur Birokrasi ( <i>Bureucratic Structure</i> )	Pemerintah desa Membagi tugas dan wewenang program pembangunan desa	84
	Pemerintah desa Ada hubungan instruksi antar pelaksanaan program	83.2
	Pemerintah desa Adanya struktur organisasi pelaksanaan program	85.6
	Pemerintah desa Adanya koordinasi dalam pelaksanaan program	82.8
	Pemerintah desa adanya standard dan prosedur dalam pelaksanaan	82.8
<b>Total</b>		<b>418.4</b>
<b>Rata – rata</b>		<b>83.6</b>

Sumbet data: *olahan peneliti 2021*

#### 4.3.2. Analisis Peningkatan Partisipasi Masyarakat

partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan masyarakat. Untuk mendorong rakyat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong, bukan mengharuskan partisipasi masyarakat; seperti halnya mendorong masyarakat untuk mau berkorban, juga membutuhkan insentif tersendiri. Tidak cukup dikatakan bahwa karena pembangunan itu untuk masyarakat, maka adalah mutlak bila rakyat mau berpartisipasi dalam pembangunan. Pengalaman pembangunan membuktikan bahwa seringkali pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat. Sering pemerintah mengklaim telah berbuat yang terbaik untuk masyarakat dalam setiap sektor, sesuai dengan fungsi pemerintah dibidang pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Tetapi pada kondisi tertentu, masyarakat dengan berbagai macam alasan menggugat pemerintah karena

dianggap tidak aspiratif dan akomodatif dalam pelaksanaan pelbagai program kegiatan dan proyek pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah partisipasi masyarakat baik dalam proses perumusan rencana, pengawasan maupun dalam menikmati hasil dari pembangunan tersebut tidak berjalan dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator peningkatan partisipasi masyarakat di kampung Kubang same desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 4.32**

**Tanggapan responden mengenai dari pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa anda merasa ada peningkatan partisipasi masyakat di kampung anda**

TANGGAPAN	JUMLAH (Orang)
Ada peningkatan	45
Tidak ada peningkatan	5

**Sumber : Data Olahan**

Dari Tabel 5.32 diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa. Anda merasa ada peningkatan partisipasi masyakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand dengan jumlah masyarakat 50 orang yaitu responden yang memberikan tanggapan ada peningkatan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae sebanyak jumlah 45 orang sedangkan tanggapan tidak ada peningkatan partisipasi masyarakat jumlah 5 orang.

### **4.3.3. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kampung Kubang Samae Desa Tanon Kecamatan Mayor Thailand Selatan**

#### **4.3.3.1. Uji Validitas Instrumen**

Pengujian validitas tiap instrumen pertanyaan yang digunakan dalam analisis item dengan cara mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir. Mansyur menyatakan bahwasanya dalam analisis item, teknik korelasi dalam menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik pengambilan data yang banyak digunakan.

Kemudian dalam menggunakan interpretasi terhadap koefisien korelasi, mansyur menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan criteria skor total, serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item ini memiliki validitas yang cukup tinggi dan biasanya syarat minimum data untuk dapat memenuhi syarat adalah apabila  $r = \text{positif (+)}$ , jadi jika korelasi antar pertanyaan dengan skor total negative (-) maka pertanyaan dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid atau tidak sesuai dengan yang di harapkan untuk penelitian lebih lanjut.

Untuk mengetahui apakah pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat di kampung Kubang samae dapat dikatakan valid atau tidaknya maka penulis mencoba melakukan uji coba try out kepada 50 responden dengan memberikan 20 pertanyaan dari variable kebijakan pemerintah dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menguji validitas dan reabilitas dari seluruh pertanyaan yang telah diberikan.

Dari hasil pengujian melalui pengukuran validitas dengan menggunakan korelasi product moment dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0.05\%$ ), dengan cara mengkorelasikan skor masing- masing item dengan skor totalnya. Hasil pengujian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.33**  
**Hasil Uji Validitas Instrument Penelitian**

Variabel	Item	Corrected Item Total Corelations (r - hitung)	Sig (2-tailed)	r – Tabel ( $\alpha = 0.05\%$ )	Keterangan Hasil
Kebijakan pemerintah	X1	.573	0.000	0.279	Valid
	X2	.544	0.013	0.279	Valid
	X3	.517	0.000	0.279	Valid
	X4	.441	0.003	0.279	Valid
	X5	.395	0.010	0.279	Valid
	X6	.382	0.000	0.279	Valid
	X7	.347	0.052	0.279	Valid
	X8	.395	0.023	0.279	Valid
	X9	.496	0.052	0.279	Valid
	X10	.566	0.001	0.279	Valid
	X11	.578	0.028	0.279	Valid
	X12	.558	0.007	0.279	Valid
	X13	.432	0.018	0.279	Valid
	X14	.523	0.004	0.279	Valid
	X15	.495	0.046	0.279	Valid
	X16	.545	0.036	0.279	Valid
	X17	.355	0.002	0.279	Valid
	X18	.425	0.052	0.279	Valid
	X19	.520	0.006	0.279	Valid
	X20	.609	0.001	0.279	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 22.00

Instrument dikatakan valid jika Corrected Item Total Correlations (r hitung) menunjukkan korelasi yang signifikan antara skor item dengan skor total atau dengan cara membandingkan nilai korelasi masing- masing item dengan nilai korelasi tabel (r tabel), jika  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$  maka instrument dikatakan valid.

Tabel menunjukkan bahwa butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari r tabel dengan tingkat  $\alpha = 0.05\%$  dan dengan 50 responden maka nilai r tabel lebih besar dari 0.279 sehingga butir pertanyaan yang diajukan dinyatakan valid dan layak dianalisis.

#### 4.3.3.2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reabilitas adalah pengujian yang berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap alat test (instrument). Suatu instrument dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi apabila hasil dari pengujian tersebut menunjukkan hasil yang tetap atau tidak berubah. Dengan kata lain, masalah reabilitas test atau instrument yang berhubungan dengan penetapan masalah hasil. Jika terdapat perubahan dalam hasil akhir test atau instrument maka perubahan tersebut dianggap tidak berarti.

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula *Alpha Cronboach*, dimana hasil ujinya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 5.34**  
**Hasil Uji Reliabilitas Instrument Penelitian**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.879	.880	20

**Sumber : Data Olahan SPSS Versi 22.00**

Pengujian reliabilitas instrument dilakukan pada item- item pertanyaan yang memiliki validitas. Instrument dinyatakan reliabel jika nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,5. Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa masing- masing nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,5 sehingga instrument yang digunakan dinyatakan reliabel.

#### 4.3.3.3 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif dimaksudkan untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*), Sikap (*Dispotitions or attitude*) dan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand. Berdasarkan hasil kuesioner, tabel descriptive statistic memperlihatkan hasil sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**Descriptive Statistics**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
<b>X1</b>	50	9.00	25.00	20.9600	2.42403
<b>X2</b>	50	13.00	25.00	20.7400	2.31948
<b>X3</b>	50	12.00	25.00	20.7400	2.61713
<b>X4</b>	50	13.00	25.00	29.9400	2.46121
<b>Y</b>	50	.00	1.00	.9000	.30305
<b>Valid N (listwise)</b>	50				

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 22.00

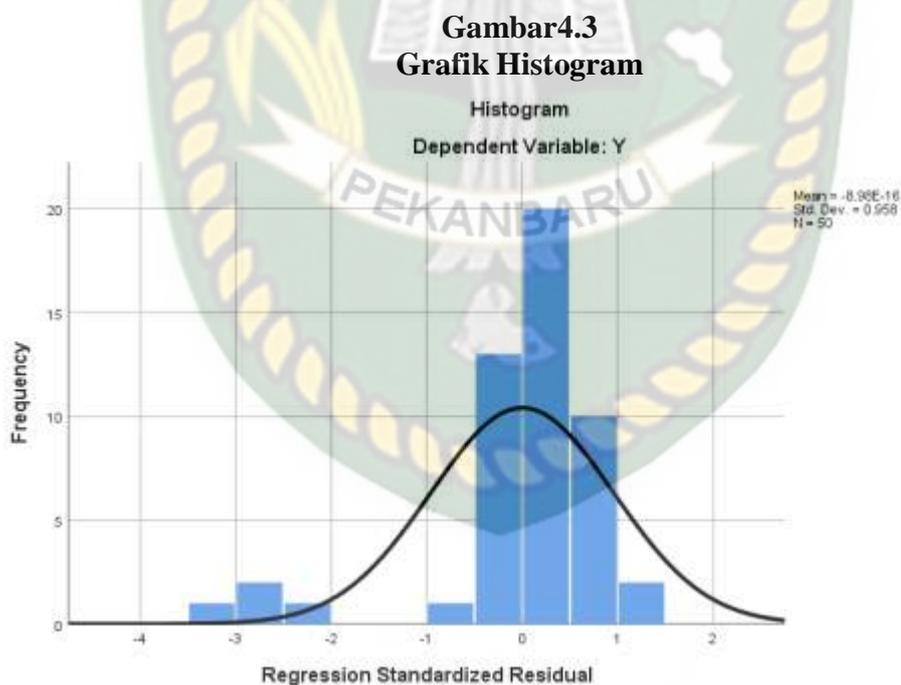
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelskan bahwa, dalam penelitian ini terdapat 4 independen yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*),

Sikap (*Dispotisions or attitude*) dan Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*). Serta terdapat satu variabel dependen yaitu peningkatan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand

#### 4.3.3.4. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependent dan independent mempunyai distribusi normal atau tidak. dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik histogram, *one-sample kolmogorov-Smirnov Test*, dan *Normal probability plot*, pada penelitian ini tampak pada gambar 4.2 berikut:



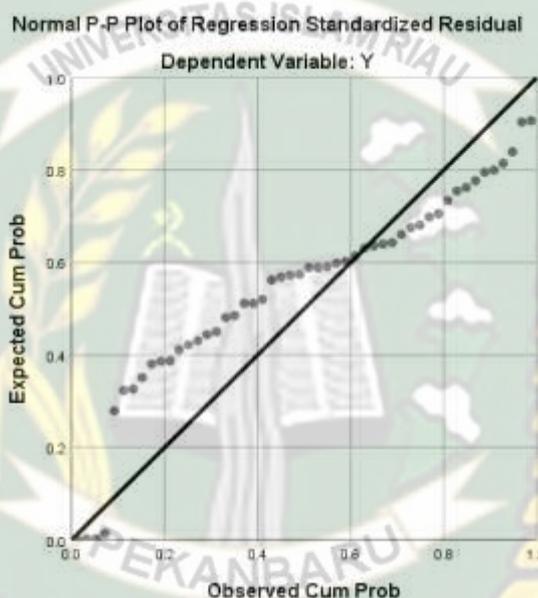
**Sumber : Data Output SPSS, 22.00**

Histogram pada gambar 4.2 diatas telah memperlihatkan posisi normal, dimana tidak terjadi posisi miring (*skewness*) dan kurva memiliki keseimbangan

tepat ditengah, dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel penelitian berdistribusi normal.

Selain itu untuk melihat normalitas dapat dilihat pada *Normal probability plot*, dapat diperhatikan pada gambar 4.3 berikut :

**Gambar 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas**



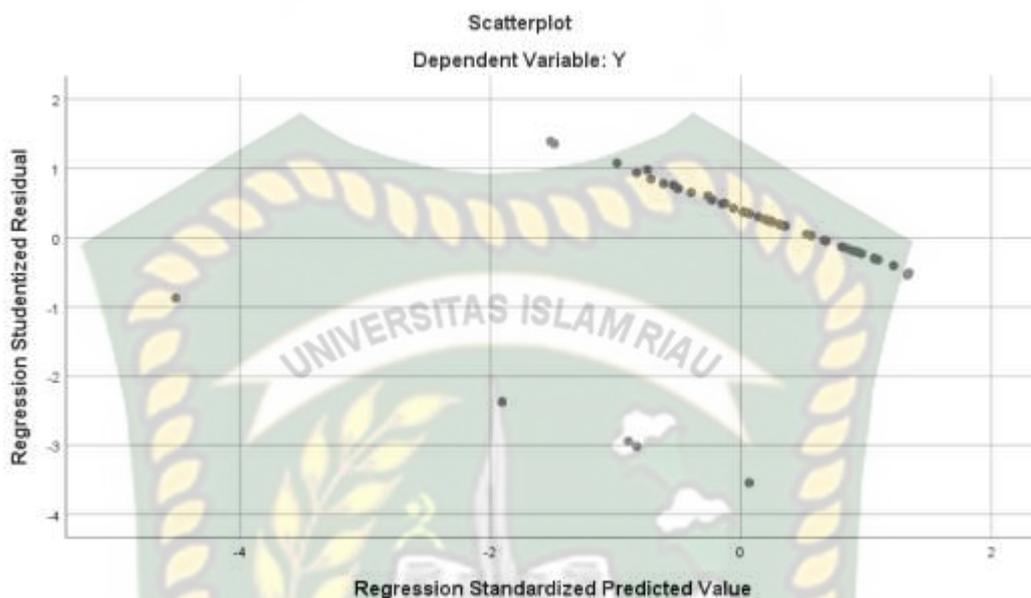
**Sumber : data Output SPSS, 22.00**

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas

## 2. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dari pada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas dan jika titiknya menyebar tidak pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.

**GAMBAR 4.5**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Data *Ouput* SPSS, 22.00

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa penyebaran data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

### 3. Uji Multikolinieritas

Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22.00 maka deteksi adanya Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai VIF berkisar 1 maka tidak ada korelasi. Cara yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinieritas adalah jika nilai *tolerance* dibawah 0,1 atau sama dengan nilai VIF >10 maka bisa disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.35 berikut:

**Tabel 4.35**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Komunikasi ( <i>Communication</i> )	0.332	3.016	Tidak terjadi multikolinieritas
Sumber daya ( <i>Resources</i> )	0.321	3.114	Tidak terjadi multikolinieritas
Sikap ( <i>Dispotisions or attitude</i> )	0.354	2.822	Tidak terjadi multikolinieritas
Stuktur birokrasi ( <i>Bureaucratic structure</i> )	0.303	3.299	Tidak terjadi multikolinieritas

**Sumber : Data Output SPSS, 20201**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolinieritas variabel Komunikasi (*Communication*) memiliki nilai VIF 3.016 dan nilai toleransi 0.332; variabel Sumber daya (*Resources*) memiliki nilai VIF 3.114 dan nilai toleransi 0.321; variabel Sikap (*Dispotisions or attitude*) memiliki nilai VIF 2.822 dan nilai toleransi 0.354, dan variabel Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) memiliki nilai VIF 3.299 dan nilai toleransi 0.303. Dari keempat variabel independen tersebut semua nilai toleransi berada diatas atau  $>0,1$ , dan nilai VIF dibawah atau  $<10$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinieritas.

#### **4.3.3.5. Pengujian Hipotesis**

##### **1. Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi linear bergnda digunakan untuk mengetahui Pengaruh Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources* Sikap (*Dispotisions or attitude*) dan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*), dan moralitas terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon

kecamatan Mayor Thailand selatan. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.36 :

**Tabel 4.36**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleransi	VIF
<b>1(Constant)</b>	-.024	.369		-.064	.949		
<b>X1</b>	.103	.027	.825	3.801	.000	.332	3.016
<b>X2</b>	.034	.029	.262	1.185	.242	.321	3.114
<b>X3</b>	-.018	.024	-.152	-.723	.473	.354	2.822
<b>X4</b>	-.076	.028	-.614	-2.704	.010	.303	3.299

a. Dependent Variable: Y

**Sumber : Data Output SPSS, 2021**

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = -0.024 + 0.103 X_1 + 0.034 X_2 - 0.018 X_3 - 0.076 X_4 + e$$

Hasil dan pembahasan regresi diatas adalah:

- Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -.024 artinya jika Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*), Sikap (*Dispotisions or attitude*) dan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) 0 (nol) maka peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand Tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel Komunikasi (*Communication*) ( $X_1$ ) bernilai 0.103 yang dapat diartikan bahwa setiap Komunikasi (*Communication*) sebesar 1 maka akan terjadi pengurangan peningkatan partisipasi masyarakat di

kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand sebesar 0.103 dengan asumsi Sumber daya (*Resources*), Sikap (*Dispotisions or attitude*) dan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) adalah konstan.

- c. Nilai koefisien regresi variabel Sumber daya (*Resources*) (X2) bernilai 0.034 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Sumber daya (*Resources*) sebesar 1 maka akan terjadi pengurangan peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand sebesar 0.034 dengan asumsi pemahaman akuntansi dan pemanfaatan SIA adalah konstan.
- d. Nilai koefisien regresi variabel Sikap (*Dispotisions or attitude*) (X3) bernilai -0.018 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan peran internal a Sikap (*Dispotisions or attitude*) sebesar 1 maka akan terjadi penurunan peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand sebesar -0.018 dengan asumsi pemahaman akuntansi dan pemanfaatan SIA adalah konstan.
- e. Nilai koefisien regresi variabel Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) (X4) bernilai -0.076 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) sebesar 1 maka akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand sebesar -0.076 dengan asumsi pemahaman akuntansi dan pemanfaatan SIA adalah konstan.

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*), Sikap (*Dispotisions or attitude*) dan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand. Hasil uji F dapat dilihat pada Gambar 4.5

**Gambar 4.6**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.334	4	.333	4.739	.003 <sup>b</sup>
	Residual	3.166	45	.070		
	Total	4.500	49			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4

Sumber : Data *Output* SPSS, 22.00

Uji pengaruh simutan ini dapat dilihat dari *p-value significant*. Nilai *p-value significant* sebesar 0.003 yaitu signifikan pada tingkat probabilitas 0.05 yang berarti variabel-variabel independen dapat digunakan dalam memprediksi variabel dependennya.

Berdasarkan Gambar 4.5 didapat nilai signifikansi sebesar 0.003: karena tingkat probabilitas signifikan lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*), Sikap (*Dispotisions or attitude*) dan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) mempunyai pengaruh signifikan secara simultan terhadap peningkatan partisipasi

masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand.

### 3. Uji Parsial (Uji t-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap kebijakan pemerintahan desa. Pengujian ini dilakukan dengan melihat tingkat signifikan dari masing-masing variabel. Apabila signifikansi  $< 0.05$  maka hipotesis ditolak. Hasil uji t terhadap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 4.37. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada hasil dan pembahasan sebagai berikut :

#### a. Uji variabel Komunikasi (*Communication*)

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Komunikasi (*Communication*)(X1) nilai signifikannya adalah  $0.000 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Komunikasi (*Communication*) H1 : diterima sedangkan H0 : Ditolak mengatakan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand.

#### b. Uji variabel Sumber daya (*Resources*)

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Sumber daya (*Resources*) (X2) nilai signifikannya adalah  $0.242 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Sumber daya (*Resources*) H2 : ditolak sedangkan H0 :

diterima mengatakan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand.

**c. Uji variabel Sikap (*Dispotisions or attitude*)**

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh hasil uji t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Sikap (*Dispotisions or attitude*) (X3) nilai signifikannya adalah  $0.473 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Sikap (*Dispotisions or attitude*) H3 : ditolak sedangkan H0 : diterima mengatakan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand.

**d. Uji variabel Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*)**

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh hasil t yang diperlukan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Untuk variabel Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) (X4) nilai signifikannya adalah  $0.010 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) H4 : diterima sedangkan H0 : ditolak mengatakan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand.

#### 4. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi berguna untuk mengukur variasi dalam variabel independen mampu menjelaskan bersama-sama variabel dependen.

**Tabel 4.37**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate
1	.544 <sup>a</sup>	.296	.234	.26525

**a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3, X4**

**b. Dependent Variable: Y**

Pada Tabel 4.37 dapat dijelaskan bahwa koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0.544 mendekati nilai 1 artinya hubungan antara variabel Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*), Sikap (*Dispotisions or attitude*) dan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) terhadap terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand sedang erat.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.296 artinya bahwa 0.296 atau 29.6% artinya pengaruh Komunikasi (*Communication*), Sumber daya (*Resources*), Sikap (*Dispotisions or attitude*) dan Stuktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor Selatan Thailand sedangkan sisanya sebesar 70.4% dapat dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model atau persamaan regresi ini.

Dari hasil di atas bahwa dapat berkaitan antara variabel X dengan variabel Y karena masyarakat kampung Kubang same desa Tanon kecamatan Mayor

Thailand selatan merasa ada peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

##### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai Implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung Kubang samae desa Tanon kecamatan Mayor selatan thailand secara deskriptif dalam penelitian ini yang telah dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Dengan ini peneliti menggunakan teknik analisis data yang dipergunakan adalah uji valibilitas, koefisien korelasi dan koefisien determinasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### จากผลการวิจัยและการอภิปรายในบทที่ 4

เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหมู่บ้านในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่บ้านกุ่มบังแสมหมู่บ้านตะนอนภาคใต้ของประเทศไทยในการวิจัยเชิงพรรณนาซึ่งได้ดำเนินการกับผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน

ด้วยวิธีนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้คือการทดสอบความตรงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์การกำหนดสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้:

1. Berdasarkan uji Valibilitas dengan menunjukkan korelasi yang signifikan antara skor item dengan skor total atau dengan cara membandingkan nilai korelasi masing- masing item dengan nilai korelasi tabel (r tabel), jika r hitung > r tabel maka instrument dikatakan valid.

จากการทดสอบความถูกต้องโดยแสดงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างคะแนนรายการและคะแนนรวมหรือโดยการเปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับตารางค่าสหสัมพันธ์ (ตาราง **r**) ถ้าตาราง **r count** > **r** แล้วเครื่องมือจะกล่าวว่าจะถูกต้อง

2. Berdasarkan uji koefisien korelasi menunjukan bahwa hubungan antara Variabel – Variabel terhadap partisipasi masyarakat di kampung Kubang same desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand itu sedang.

จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและตัวแปรต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่บ้านกุงหมู่บ้านตะนอนตำบลใหญ่ภาคใต้อยู่ในระดับปานกลาง

3. Berdasarkan uji koefisien determinasi menunjukkan hasil yang didapat adalah antara Variabel – Variabel terhadap partisipasi masyarakat di kampung Kubang same desa Tanon kecamatan Mayor Selatan Thailand itu dikatakan kurang maksimal.

จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การกำหนดแสดงให้เห็นว่าผลที่ได้รับอยู่ระหว่างตัวแปรและตัวแปรในการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่บ้านกุงหมู่บ้านตะนอนอำเภอสำคัญทางภาคใต้ของประเทศไทยพบว่าน้อยกว่าที่เหมาะสม

## 5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mencoba memberikan saran terhadap hasil penelitian agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya mengenai peningkatkan partisipasi masyarakat di kampung Kubang same desa

Tanon kecamatan Mayor selatan Thailand, maka kiranya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

จากผลการวิจัยและการอภิปรายตลอดจนข้อสรุปที่ได้ธบายไว้ก่อนหน้าผู้วิจัยพยายามให้ข้อเสนอแนะสำหรับผลการวิจัยเพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยรัฐบาลหมู่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่บ้านภูเขาแมภาคใต้ที่สำคัญฉันหวังว่าผู้เขียนจะสามารถให้คำแนะนำ - คำแนะนำต่อไปนี้

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat, maka pemerintah desa perlu:

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลหมู่บ้านในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนรัฐบาลหมู่บ้านจำเป็นต้อง:

1. Sebaiknya perlu pemerintahan desa di Kampung Kubang samae desa Tanon Kecamatan Mayor Provinsi Pattani Thailand Selatan ikut berpartisipasi bersama masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat.

จะดีกว่าถ้าผู้บริหารหมู่บ้านในหมู่บ้านภูเขาเมษายนเทศมนตรีจังหวัดปัตตานีภาคใต้ควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมพัฒนาชุมชน

2. Sebaiknya perlu pemerintahan desa di Kampung Kubang samae desa Tanon Kecamatan Mayor Provinsi Pattani Thailand selatan menekankan kepada masyarakat bahwa mereka harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan di Kampung tersebut.

จะดีกว่าหากอปท. ในหมู่บ้านบั้งแสมหมู่บ้านตะโหนดนายเทศมนตรีจ.ปัตตานีภาคใต้เน้นย้ำกับชุมชนว่าต้องมีความรับผิดชอบในการพัฒนาหมู่บ้าน

3. Sebaiknya perlu pemerintahan desa di Kampung Kubang samae desa Tanon Kecamatan Mayor Provinsi Pattani Thailand selatan adanya perbaikan di dalam proses penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya di dalam mencapai tujuan.

จะดีกว่าหากหน่วยงานของรัฐในหมู่บ้านกูบังแสมหมู่บ้านตะโหนดนายกเทศมนตรีจังหวัดปัตตานีภาคใต้ของประเทศไทยจะต้องได้รับการปรับปรุงในกระบวนการประเมินการปฏิบัติตามหน้าที่และหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa maka akan menciptakan peningkatan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karena itu disarankan kepada pihak pemerintahan desa Tanon selatan Thailand selalu merencanakan program-program pembangunan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa ke masa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sampai kepada tahap maksimal.

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายิ่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหมู่บ้านได้ดีการมีส่วนร่วมของชุมชนก็จะเพิ่มขึ้น  
ดังนั้นจึงเสนอแนะให้รัฐบาลหมู่บ้านตะโหนดตอนใต้ของประเทศไทยวางแผนโครงการพัฒนาและดำเนินนโยบายตามความต้องการของชุมชนเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนให้อยู่ในระดับสูงสุด

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Cuwong cayabut. 1999. *Teori pemerintahan local*, Bangkok percetakan local departemen anministrasi provinsi.
- Handoyo Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Hisyam Djihad dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000
- Kowit puangngam.2001, *prinsip dan dimensi baru di masa depan*, Bangkok winyuchon
- Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Makmur. 2012. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Nurman. 2017. *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo Adisasmitta, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Grada Ilmu,2011
- Rahmat Maulana. 2014, *Konsep pemerintahan desa*, Yokyakarta, Gramidia 2014
- Rauf Rahyunir, Maulidiah. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa. Riau*.
- Rusyan Tabrani. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyan Tabrani. 2018. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyan Tabrani. 2018. *Membangun Kepala Desa Teladan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta : Yayasan Pancur Siwa, 2004)
- Singarimbun, Masri.1995.*Metode penelitian Survei*. LP3S, Jakarat

- Somkid leodpaibun. 2005, *desentralisasi yudisial kekuasaan kepada pemerintah*. Bangkok thammasat university, badan pembangunan demokrasi.
- Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR
- Surianingrat Bayu 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Jawa Barat
- Talizuduhu Ndaraha,2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Winarno Budi, 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS(Center Of Academic Publishing Service). Yogyakarta.
- W.J.S. Purwadaminto, *Kamus Uum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Nilai Pustaka, 1986
- Yusri munaf, 2015. *Hukum administrasi Negara, Marpoyan tujuh publishing*.

#### **B. TESIS**

- Ari Hamdaya. 2015. *Peranan kepala desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Pinang Sebatang kecamatan Tulang kabupaten Siak*. Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
- Hamdan Hamid.2016. *peranan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Batu Belah kecamatan Kampar kabupaten Kampar*. Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
- Ismail. 2016. *Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bangkalis*. Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
- Martiana Dwi Rahayu.2017. *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Sinasri kecamatan Kalirejo kabupaten Lampung tengah*. Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
- Nurholis.2011. *Peranan kepala desa dalam mengkoordinasikan pembangunan di desa Dayo kecamatan Tandun kabupaten Rokan hulu*. Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Sarah Nuramalia Putri.2015. *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi kasus desa Balesari kecamatan Bansari kabupaten Temanggung)*  
Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Syafee-i. 2018. *Peranan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung Blukahilir Barat Kecamatan Batong Thailand Selatan.*  
Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi publik Universitas Islam Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau